

**POLA KANDIDASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024
(Studi Komparasi Partai Demokrat dan
Partai Keadilan Sejahtera Lampung Dapil 6)**

(Tesis)

Oleh

**IRMA RACHMAYANI
NPM 2126021014**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
POLA KANDIDASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024
(Studi Komparasi Partai Demokrat dan
Partai Keadilan Sejahtera Lampung Dapil 6)

Oleh

IRMA RACHMAYANI

Penelitian ini membahas kandidasi calon anggota legislatif yang dilakukan oleh PKS dan Partai Demokrat dalam Pemilihan Legislatif 2024, khususnya di Dapil 6 Lampung, dengan menggunakan teori Hazan dan Rahat (2010) tentang pola kandidasi. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan perbandingan. Informan meliputi pengurus struktural PKS dan Demokrat serta calon anggota legislatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Pada aspek calon; PKS lebih inklusif dalam proses pencalonan. Sementara Demokrat mengutamakan tokoh eksternal yang memiliki popularitas tinggi. 2) Berdasarkan aspek pembuat keputusan; PKS mempercayakan proses seleksi kepada BP3, dengan penetapan akhir yang dilakukan oleh DPW. Di Demokrat, Bappilu tingkat pusat menetapkan DCS dengan hak prerogatif Ketua Umum untuk penetapan akhir. 3) Di mana Calon Diputuskan; Proses seleksi PKS bersifat desentralistik di tingkat DPW, sementara Demokrat menggunakan kombinasi desentralistik di tingkat daerah (DPD/DPC) dan sentralistik di DPP, dengan keterlibatan pusat dalam tahap akhir. 4) Pada aspek, bagaimana calon diputuskan: PKS menggunakan metode penunjukan berdasarkan dukungan massa, tanpa proses pemilihan internal yang ketat. Sebaliknya, Demokrat mengedepankan suara terbanyak murni, di mana nomor urut tidak terlalu signifikan tetapi bergantung pada popularitas calon. Perbandingan pola kaderisasi PKS dan Demokrat menunjukkan bahwa PKS cenderung lebih inklusif dan desentralistik dalam proses pencalonan, sedangkan Demokrat lebih selektif, sentralistik, dan mengutamakan popularitas calon.

Kata kunci: Kandidasi, Partai Demokrat, PKS, Pemilu Legislatif 2024

ABSTRACT
CANDIDATION PATTERNS OF PROSPECTIVE LEGISLATIVE
MEMBERS IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS
(Comparative Study of the Democratic Party and
Lampung Prosperous Justice Party Electoral District 6)

By

IRMA RACHMAYANI

This study discusses of legislative candidate candidacy carried out by PKS and the Demokrat Party in the 2024 Legislative Election, especially in Electoral District 6 Lampung, using the theory of Hazan and Rahat (2010) on candidacy patterns. The research method is descriptive qualitative with a comparative approach. Informants include structural administrators of PKS and Demokrat as well as legislative candidates. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed by data reduction, presentation, and verification. The results of the study found that 1) In terms of candidates; PKS is more inclusive in the nomination process. While Demokrat prioritize external figures who have high popularity. 2) Based on the aspect of decision makers; PKS entrusts the selection process to BP3, with the final determination made by DPW. In Demokrat, the central Bappilu determines the DCS with the prerogative of the General Chairperson for the final determination. 3) Where Candidates Are Decided; The PKS selection process is decentralized at the DPW level, while the Demokrat use a combination of decentralization at the regional level (DPD/DPC) and centralization at the DPP, with central involvement in the final stage. 4) In terms of how candidates are decided: PKS uses a method of appointment based on mass support, without a strict internal selection process. In contrast, the Demokrat prioritize pure majority votes, where the serial number is not too significant but depends on the popularity of the candidate. A comparison of the PKS and Demokrat cadre formation patterns shows that PKS tends to be more inclusive and decentralized in the nomination process, while the Demokrat are more selective, centralized, and prioritize the popularity of the candidate.

Keywords: Candidacy, Demokrat Party, PKS, 2024 Legislative Elections

**POLA KANDIDASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024
(Studi Komparasi Partai Demokrat dan Partai Keadilan
Sejahtera Lampung Dapil 6)**

**Oleh:
IRMA RACHMAYANI
NPM 2126021014**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar MAGISTER
ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **Pola Kandidasi Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 (Studi Komparasi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Lampung Dapil 6)**

Nama Mahasiswa : **Irma Rachmayani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2126021014**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Arizka Warga Negara, S.IP., MA., Ph.D
NIP 19810620 200604 1 003


Dr. Tabah Maryamah, S.IP., M.Si
NIP 19710604 200312 2 001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP 19690219 199403 2 001

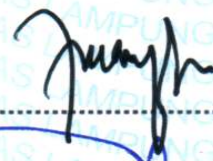
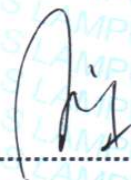
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

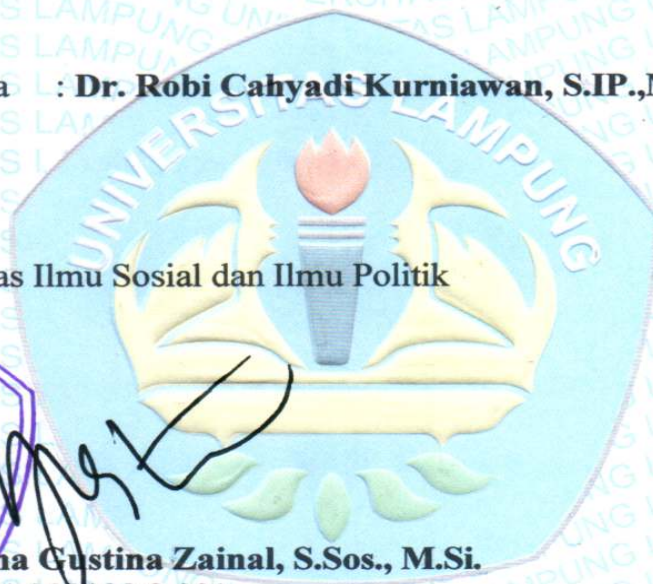
Ketua : Prof. Arizka Warganegara, S.IP., MA., Ph.D

Sekretaris : Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si

Penguji Utama : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP.,M.A



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 26 November 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 03 Januari 2025



Irma Rachmayani
NPM 2126021014

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Irma Rachmayani dilahirkan di Kartaraharja, pada 20 Februari 1995. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara dari Bapak H. Warisudin dan Ibu Hj. Lilik Ambarwati. Penulis merupakan istri dari Andri Setya Waspada, S.Tr.Par.

Jenjang pendidikan Penulis di mulai dari tahun 2001-2007 di SDN 01 Kartaraharja, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dilanjutkan di MTs Miftahul Jannah Kartaharja Kabupaten Tulang Bawang Barat di tahun 2007-2010. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2010-2012. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung Tahun 2012-2014 dan melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Lampung Tahun 2015-2019.

Penulis pernah bekerja di ADC Bupati Tulang Bawang Barat tahun 2014-2016. Kemudian pada tahun 2016-2023 Penulis bekerja di Staf Prokoloh Pemkab. Tulang Bawang Barat selanjutnya di Tahun 2021-2023 Penulis bekerja di Product Manajer Akira Training dan Consulting, Bandar Lampung.

MOTTO

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit”

(Nabi Muhammad SAW)

Tidak ada yang lebih indah kecuali rasa syukur, bersyukurlah maka hidup akan selalu indah

(Irma Rachmayani)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak Tesis ini
dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Dan

Ku persembahkan Karya ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Serta saudara-saudaraku yang ku sayangi sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terimakasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana Magister
Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari
Allah SWT.

Almamater yang Penulis cinta dan banggakan

Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa Penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Tesis yang berjudul “Pola Kandidasi Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 (Studi Komparasi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Lampung Dapil 6)” sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu H. Warisudin dan Hj. Lilik Ambarwati atas segala doa yang tucurahkan, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang tidak akan mampu penulis balas atas banyaknya kebaikan yang diberikan kepada Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kakak Penulis yaitu Mashudi Ma’ruf., M.Pd.I dan Lettu Sus M Zainal Arifin atas segala dukungan dan kasih sayang selama ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan dalam kalian beraktivitas.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA, IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan;
5. Bapak Prof Arizka Warganegara, S.IP., MA., Ph.D selaku Pembimbing Utama Tesis, terimakasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan saran sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan tesis ini. Semoga atas segala yang bapak berikan menjadi amalan kebaikan bapak baik di dunia maupun di akhirat.

6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP. M.Si selaku Pembimbing Kedua. Terimakasih atas bimbingan, masukan dan motivasi yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan bapak di dunia maupun di akhirat kelak.
7. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan selaku Dosen Pembahas. Terimakasih atas krtitik, saran, motivasi dan bimbingan sehingga tesis ini memiliki kemajuan yang signifikan pada setiap perbaikan. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan bapak di dunia maupun diakhirat kelak.
8. Suami Penulis Andri Setya Waspada., S.Tr.Par terimakasih atas segala dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung serta kepada Anak-anakku yaitu Hafiya Annisaa Kamaliya dan Haqqi Elzayn Waspada terimakasih atas segala pengertian kalian sehingga dapat terselesaikannya Tesis ini.
9. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, memberikan ilmu, pengalaman dan pembelajaran hidup serta pengetahuan yang diberikan semasa perkuliahan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dalam memberikan perkuliahan di Magister Ilmu Pemerintahan.
10. Semua teman-teman perjuangan di Pascasarjana Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 yaitu Lidya, Ella, Awan, Naufal, Fathan yang selalu menemani Perjuangan Penulis di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
11. Narasumber Penelitian terimakasih telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada Penulis.

Bandar Lampung, 03 Januari 2025

Irma Rachmayani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR SINGKATAN	1
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Partai Politik dan Fungsinya.....	12
2.2. Rekrutmen Partai Politik.....	18
2.3. Pengertian dan Pola Kandidasi	22
2.4. Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Tipe Penelitian	36
3.2. Fokus Penelitian	37
3.3. Informan Penelitian.....	38
3.4. Jenis Data.....	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	41
3.6. Teknik Pengolahan Data	44
3.7. Teknik Analisis Data.....	44
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	46
IV. GAMBARAN UMUM.....	47
4.1. Partai Demokrat Lampung.....	47
4.1.1 Sejarah berdirinya Partai Demokrat	47
4.1.2 Asas, Doktrin, Sifat, Ideologi, dan Tujuan Partai Demokrat	51

4.1.3 Susunan Struktur Organisasi Partai dan Keanggotaan Partai	53
4.1.4 DPD Partai Demokrat Lampung.....	56
4.1.5 Keikutsertaan Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum.....	59
4.1.6 Aturan Partai Demokrat dalam Rekrutmen Calon Legislatif.....	60
4.1.7 Daftar Nama Calon Anggota Legislatif Tetap Partai Demokrat pada Pemilu 2024.	67
4.2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	71
4.2.1 Sejarah Partai Keadilan Sejahtera.....	71
4.2.2 Struktur Kepengurusan DPW PKS Lampung	72
4.2.3 Visi Misi PKS.....	73
4.2.4 Falsafah Dasar Perjuangan PKS	74
4.2.5 Tim Perekrut Calon Anggota Legislatif DPW PKS Lampung	76
4.2.6 Daftar Nama Calon Anggota Legislatif Tetap PKS pada Pemilu 2024.....	76
4.2.7 Daftar Nama Anggota Legislatif PKS Provinsi Lampung Periode 2019-2024	81
4.2.8 Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif PKS Prov Lampung 2024.....	81
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	86
5.1. Pola Kandidasi Partai Demokrat Lampung dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung	88
5.1.1 Pola Kandidasi Anggota Legislatif Partai Demokrat Lampung.....	90
5.1.2 Pola Kandidasi Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung.....	114
5.2. Perbandingan Pola Kandidasi Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dan PKS Lampung	136
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Kasus Korupsi Figur Partai Demokrat.....	4
2. Fokus Penelitian.....	38
3. Informan Penelitian	40
4. Susunan Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung	56
5. Calon Legislatif Dapil 1	67
6. Calon Legislatif Dapil 2.....	68
7. Calon Legislatif Dapil 3.....	68
8. Calon Legislatif Dapil 4.....	68
9. Calon Legislatif Dapil 5.....	69
10. Calon Legislatif Dapil 6.....	69
11. Calon Legislatif Dapil 7.....	70
12. Calon Legislatif Dapil 8.....	70
13. Calon Legislatif Dapil 1 Kota Bandar Lampung	77
14. Calon Legislatif Dapil 2 Lampung Selatan.....	77
15. Calon Legislatif Dapil 3 Pesawaran dan Pringsewu.....	78
16. Calon Legislatif Dapil 4 Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.....	78
17. Calon Legislatif Dapil 5 Waykanan dan Lampung Utara	79
18. Calon Legislatif Dapil 6 Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.....	79
19. Calon Legislatif Dapil 7 Lampung Tengah	80
20. Calon Legislatif Dapil 8 Lampung Timur	80
21. Anggota Legislatif PKS Prov Lampung Periode 2019-2024.....	81
22. Daftar Sementara Anggota Legislatif PKS yang Lolos Pada Pemilu 2024.....	81
23. Calon Anggota Legislatif PKS Dapil 6 Berdasarkan Asal dan Gender.....	103

24. Daftar Nomor Urut PKS Dapil 6.....	113
25. DCT Dapil 6.....	114
26. Perbandingan proses kandidasi calon anggota legislatif Partai Demokrat dan PKS	138
27. Hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) Lampung 2024	139
28. Hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 Dapil 6 Lampung.....	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kandidat yang di Seleksi.....	25
Gambar 2. Kandidasi	28
Gambar 3. <i>Exclusiveness and Centralization as Separate Dimensions</i>	32
Gambar 4. Kerangka Pikir	35
Gambar 5. Bagian Falsafah Dasar Perjuangan PKS.....	75

DAFTAR SINGKATAN

SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
Dapil	: Daerah Pemilihan
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
AD&ART	: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
TOP I	: Training Orientasi Partai I
TOP II	: Training Orientasi Partai II
SKAP	: Surat Kelulusan Anggota Pemula
KTAP	: Kartu Tanda Anggota Pemula
TD I	: Training Dasar I
TD II	: Training Dasar II
TL I	: Training Lanjutan I
TL II	: Training Lanjutan II
TMKS	: Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial
PK	: Partai Keadilan
HAM	: Hak Asasi Manusia
TRP	: Taklim Rutin Partai
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih wakil mereka dalam lembaga legislatif. Di Indonesia, Pemilu Legislatif yang dilaksanakan secara berkala menjadi arena bagi partai politik untuk bersaing memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemilu ini tidak hanya penting bagi representasi politik, tetapi juga menentukan arah kebijakan publik di berbagai sektor. Proses kandidasi atau pemilihan calon anggota legislatif (caleg) menjadi salah satu tahapan krusial yang berdampak besar terhadap kualitas demokrasi serta kredibilitas partai dalam menyaring kader-kader yang berkompeten untuk menjalankan fungsi legislatif.

Secara umum, proses kandidasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah transparansi dalam proses rekrutmen dan seleksi caleg. Beberapa partai politik sering kali tidak menyediakan informasi yang memadai mengenai proses rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif, sehingga masyarakat tidak mengetahui kriteria dan mekanisme yang digunakan. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan agar partai politik menjalankan proses seleksi caleg secara terbuka dan demokratis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing partai. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa caleg yang diusung benar-benar mewakili aspirasi

rakyat serta memiliki integritas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi legislatif.

Selain masalah transparansi, pendekatan rekrutmen yang digunakan oleh partai politik juga bervariasi, tergantung pada strategi dan ideologi partai tersebut. Sebagian partai menerapkan sistem rekrutmen yang berfokus pada kader internal, sedangkan partai lain cenderung mengutamakan rekrutmen tokoh-tokoh populer dari luar partai. Perbedaan pendekatan ini berimplikasi pada kualitas dan karakter caleg yang dihasilkan, di mana partai yang lebih terbuka terhadap tokoh eksternal mungkin lebih cepat meraih popularitas, tetapi sering menghadapi tantangan dalam hal loyalitas dan kohesi internal partai.

Dalam konteks Pemilu 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menampilkan pola kandidasi yang cukup berbeda. PKS dikenal sebagai partai kader dengan sistem rekrutmen yang terstruktur dan metodis, berlandaskan pada ideologi dan pendidikan kaderisasi yang sistematis. Pendekatan ini menghasilkan kader yang loyal dan memiliki militansi tinggi, namun partai ini menghadapi tantangan untuk memperluas daya tarik di luar basis ideologisnya. Hal tersebut menunjukkan keseriusan PKS dalam membangun sumber daya manusia partai. PKS membangun militansi anggota melalui pembinaan yang dilaksanakan dalam proses kaderisasi (Rahmat, 2008).

Di sisi lain, Partai Demokrat cenderung mengadopsi pendekatan yang pragmatis dengan lebih mengutamakan rekrutmen tokoh-tokoh populer, bahkan jika mereka berasal dari luar partai. Demokrat berfokus pada perekrutan figur-figur yang sudah dikenal publik sebagai upaya untuk meraih dukungan elektoral yang cepat, meskipun pendekatan ini

dapat menyebabkan kohesi internal yang rentan serta konflik kepentingan antar-kader. Seperti disampaikan oleh (Urbaningrum, 2010) bahwa Partai Demokrat memiliki sejarah yang berbeda dari PKS. Partai Demokrat didirikan pada tahun 2002 karena melihat adanya peluang menarik suara dengan mengandalkan popularitas tokoh. Susilo Bambang Yudhoyono atau menjadi tokoh yang dianggap karismatik dan menjadi ujung tombak perjuangan partai ini. PKS dan Partai Demokrat memiliki pilihan berbeda dalam pengorganisasian partainya.

Hal tersebut menunjukkan perbedaaan mendasar dalam pengorganisasian PKS dan Partai Demokrat. Tetapi, ada problema yang tidak mampu dihindari oleh masing-masing partai karena pilihan politik yang diambil. Partai Demokrat berhasil mengelola popularitas tokoh, tetapi gagal mengelola organisasinya. Akibatnya, organisasinya mudah rapuh ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Kasus korupsi beberapa kader yang menjabat anggota DPR sekaligus pengurus partai menunjukkan lemahnya kemampuan partai sebagai organisasi (Mentari, 2018).

Beberapa kader Partai Demokrat terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 81 mantan narapidana korupsi masuk ke dalam daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia (Farisha & Gatra, 2019). Adapun beberapa kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi, sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Korupsi Figur Partai Demokrat

Nama Kader	Jabatan	Kasus
Andi M. Malarangeng	Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga	Proyek Hambalang.
Anas Urbaningrum	Mantan Ketua Umum Partai Demokrat	Korupsi Hambalang
Hartati Murdaya	Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat	Korupsi Buol
Jero Wacik	Mantan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat	Korupsi Dana Operasional Menteri
Sutan Bhatoegana	Mantan Ketua DPP Partai Demokrat	Korupsi ESDM
Muhammad Nazaruddin	Mantan Bendahara Umum	Pencucian Uang dan Korupsi Wisma Atlet
Angelina Sondakh	Mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat	Korupsi Wisma Atlet.
Amrun Daulay	Mantan anggota DPR	Pengadaan Mesin Jahit dan Sapi di Kementerian Sosial

Sumber: Sudrajat (2018)

Uraian diatas merupakan contoh kecil dari kasus korupsi yang menjerat perwakilan rakyat dari Partai Demokrat. Banyaknya elit politik yang tersandung kasus korupsi dan menurunnya kinerja anggota dewan di tingkat pusat dan daerah.

Secara khusus, dinamika ini menjadi relevan dalam konteks Pemilu 2024, terutama di Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung 6. Dapil ini mencerminkan keragaman masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga menuntut strategi kandidasi yang tepat dari partai-partai politik. Perbedaan strategi kandidasi antara PKS dan Partai Demokrat di Dapil Lampung 6 memiliki implikasi penting terhadap kualitas representasi politik di tingkat daerah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut efektivitas kedua pendekatan tersebut, baik dari segi kualitas caleg yang

dihasilkan maupun dampaknya terhadap loyalitas dan kohesi internal partai.

Terkait uraian di atas, terdapat beberapa kajian-kajian yang sudah dilakukan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai bahan perbandingan maupun referensi dalam penelitian, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Penelitian Atfal (2022) dengan judul Strategi Penjaringan Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dengan Teori Oligarki dari Winters (2011). Penelitian kualitatif ini menjelaskan bahwa Pola penjaringan PDI Perjuangan menggunakan pola inklusif dengan model pemilihan diantara nama-nama pendaftar. Fenomena oligarki kepada rekomendasi nonkader dalam penjaringan calon kepala daerah oleh PDI Perjuangan kabupaten Pesawaran pada Pilkada tahun 2020 yang tidak lepas dari kekuasaan DPP Partai meliputi: kekuasaan berdasarkan hak politik formal, jabatan resmi, koersif, mobilisasi dan kekuasaan material.

Penelitian dari Atfal (2022) di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (wawancara) tidak sama dengan yang peneliti gunakan. Penelitian ini merupakan penelitian komparasi dengan perbedaan teori yang digunakan untuk menganalisis metode pencalonan kandidat menurut Hazan dan Rahat (2010), meliputi tentang kandidat (*candidacy*), siapa yang melakukan seleksi (*the selectorate*),

desentralisasi (*decentralization*), dan penunjukan dan pemungutan suara (*appointment and voting*). Selain itu, penelitian ini pun akan menganalisis komparasi pola kaderisasi Partai Demokrat dan PKS dengan menggunakan teori Kartono (1994) terkait pola kaderisasi parpol meliputi informal dan formal.

2. Penelitian Pratama (2021) dengan judul Rekrutment Politik Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Kabupaten Tanggamus). Teori yang digunakan dari Rush dan Althoff dalam Tangkilisan (2003) terkait pola rekrutment terbuka dan pola rekrutment tertutup. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil dari penelitian ini adalah Partai Demokrat tidak memiliki kriteria khusus untuk menjadi calon anggota legislatif. Pola rekrutment Partai Demokrat dilaksanakan dengan menggunakan seleksi terbuka, namun pola rekrutment terbuka tersebut dilakukan terhadap para anggota. Sedangkan dalam perekrutan pengurus menggunakan mekanisme tertutup. Sistem rekrutmen politik di internal Partai Demokrat memiliki pola yang berbeda-beda terhadap pengurus didasarkan atas kekerabatan (*patronase*). Sedangkan sistem rekrutmen yang digunakan terhadap calon legislatifnya yaitu dengan sistem terbuka.

Penelitian dari Pratama (2021) di atas hampir memiliki kesamaan dengan penelitian ini terkait 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Sumber data yang digunakan samasama menggunakan sumber data primer dan sekunder. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi,

tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (wawancara) tidak sama dengan yang peneliti gunakan. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan objek yang diteliti serta penelitian ini menambahkan analisis komparasi pola kaderisasi Partai Demokrat dan PKS dengan menggunakan teori Kartono (1994) terkait Pola Kaderisasi parpol meliputi informal dan formal.

3. Penelitian dari Mandala (2016) berjudul “Rekrutmen Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2015” studi (Perbandingan Pada Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pesawaran). penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari perbandingan menunjukkan bahwa; Pertama, Sistem rekrutmen yang dilakukan partai Gerindra dan PKB menggunakan sistem terbuka. Kedua, seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menunjukkan bahwa calon-calon yang didukung oleh partai Gerindra dan PKB dipilih karena kedekatan dan mempunyai modal besar bukan karena pengalaman kepemimpinan atau prestasi lainnya. Ketiga, model penentuan calon pada partai Gerindra dan PKB tidak ada yang berbeda. Proses penetapan calon menunjukkan bahwa dalam penentuan calon yang akan diusung harus berdasarkan keputusan dari tingkat pusat.

Penelitian dari Mandala di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan

pedoman wawancara. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang digunakan sebagai instrumen penelitian tidak sama dengan yang peneliti gunakan. Jika penelitian dari Mandala (2016) menganalisis mengenai rekrutmen Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada tingkat daerah. Penelitian ini lebih menekankan pada rekrutmen bakal calon legislatif pada Pileg 2024 dengan fokus pada komparasi Partai Demokrat dan PKS dengan DPW Provinsi Lampung sebagai lokasi pengambilan data.

4. Penelitian Komala (2020) dengan judul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2019 di Yogyakarta Studi Kasus: Partai Solidaritas Indonesia. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan yaitu rekrutmen politik oleh Rahat dan Hazan (1) *Candidacy*; (2) *Selectorate*; (3) *Decentralization*; (4) *Appointment & Voting System*. Studi ini menyimpulkan bahwa pola rekrutmen calon legislatif PSI DIY adalah eksklusif. Hal ini disebabkan DPW PSI DIY menggunakan pola kandidasinya eksklusif karena calon yang diajukan haruslah anggota partai dan telah memenuhi kriteria khusus, kemudian pada pola penyeleksi diberlakukan secara eksklusif, desentralisasi dilakukan secara semi-demokratis dan aspek terakhir yakni sistem penunjukan dan pemilihan dilakukan secara semi-penunjukan.

Selain metode atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, kesamaan lainnya, penelitian ini menggunakan salah satu teori dari penelitian sebelumnya yaitu teori rekrutmen politik oleh Rahat dan Hazan (1) *Candidacy*; (2) *Selectorate*; (3) *Decentralization*;

(4) Appointment & Voting System. Sedangkan perbedaan lainnya, penelitian ini menganalisis komparasi pola kaderisasi dan pencalonan Partai Demokrat dan PKS.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses kandidasi kedua partai tersebut menghadapi tantangan dalam meningkatkan dukungan elektoral di Dapil yang kompetitif seperti Lampung 6. Tantangan ini meliputi kemampuan partai dalam menjaring caleg yang mampu mendekati konstituen dengan baik, serta memastikan bahwa caleg tersebut memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, kemampuan partai dalam mempertahankan loyalitas dan militansi kader juga menjadi faktor penting yang memengaruhi stabilitas partai, khususnya setelah pemilu selesai

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah *pertama*, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang mendalam antara dua partai dengan karakter dan strategi kandidasi yang sangat berbeda. *Kedua*, tidak banyak penelitian yang memfokuskan pada Dapil tertentu seperti Lampung 6 yang memiliki keragaman demografi, sosial, dan ekonomi. Fokus pada Lampung 6 menjadikan penelitian ini kontekstual dan memberikan perspektif lokal yang unik dalam dinamika politik nasional. *Ketiga*, penelitian ini tidak hanya melihat aspek elektabilitas dan dukungan masyarakat tetapi juga menyoroti dampak jangka panjang dari strategi kandidasi terhadap loyalitas kader dan kohesi internal partai. Ini jarang dikaji secara mendalam dalam studi pemilu, yang biasanya lebih berfokus pada dampak elektoral langsung. Penelitian ini menggabungkan perspektif elektoral dengan dinamika internal partai yang berpotensi memperkaya pemahaman tentang stabilitas partai pasca pemilu.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola Kandidasi Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dan PKS?
2. Bagaimana Perbandingan Pola Kandidasi Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dan PKS?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Pola Kandidasi Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dan PKS.
2. Menganalisis Perbandingan Pola Kandidasi Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dan PKS.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua:

1. Manfaat akademis

Untuk memperkaya wawasan intelektual politik. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan arti akademis dalam menambah informasi dan memperkaya wawasan politik terutama dalam mengamati dan menganalisis fakta lapangan dimana Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mempersiapkan para calon-calon anggota legislatif perwakilan partainya.

2. Manfaat praktis

Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada para calon kandidat keterwakilan masyarakat

mendatang dan sebagai bahan tambahan wawasan pola partai politik yang salah satunya saat ini sedang menjadi dasar penelitian yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, yang memiliki pola tersendiri dalam memenangkan pemilu dengan strategi yang sangat menguntungkan guna memenangkan pemilu. Lebih jauh dari tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dalam menjadi bahan evaluasi sistem kepartaian yang kemudian dapat dianut guna memperbaiki citra partai dan juga citra para wakil rakyat yang sejatinya menjadi perwakilan rakyat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi analisis literatur yang berkaitan dengan rekrutmen politik, kaderisasi partai, serta dinamika pemilihan umum di Indonesia. Beberapa konsep utama yang diulas mencakup teori-teori tentang seleksi kandidat, mekanisme internal partai, serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas rekrutmen dan kaderisasi. Studi-studi sebelumnya juga dibahas untuk memberikan landasan teoretis bagi penelitian ini, dengan fokus pada bagaimana praktik-praktik ini diterapkan di berbagai partai politik di Indonesia.

2.1. Partai Politik dan Fungsinya

Partai politik merupakan tolak ukur adanya sistem demokrasi Indonesia. Keberadaan partai politik di Indonesia merupakan salah satu bentuk kemampuan berdemokrasi dan sarana untuk mengakomodir tuntutan rakyat. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik didalam sebuah negara. Untuk memahaminya, beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian partai politik. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2015).

Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan

mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilu dan cara-cara lain yang sah (Surbakti, 2010).

Partai politik menurut Giovanni Sartori adalah “suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik” (Budiardjo, 2015). Menurut Firmanzah (2018) “partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam sistem demokrasi modern”. Partai politik (Parpol) memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik.

Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi adalah sangat esensial. Kelahirannya bukan tanpa tujuan dan fungsi tertentu. Theorem ‘*no free lunch*’ sangat lekat dengan identitas partai politik sebagai organisasi yang sarat akan kepentingan dalam setiap kebijakan yang diambil, baik di level partai sebagai organisasi, pada setting proses elektoral, hingga ketika partai berhasil menduduki kursi pemerintah baik di level eksekutif maupun legislatif (Sujatmiko, 2016). Dengan demikian, secara teoritis, partai politik adalah pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab terhadap rekrutmen elite politik, khususnya dalam menyeleksi orang-orang yang dinilai paling sesuai dengan ideologi dan kepentingan partai politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu (Darmastuti, 2020).

Menurut V.O. Key Jr., (1958) partai politik adalah kelompok terorganisir yang bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum serta memengaruhi kebijakan pemerintah. Key menegaskan bahwa partai politik berfungsi

sebagai penghubung utama antara masyarakat dan pemerintah, yang berperan dalam menyusun pilihan politik dan mendukung keberlangsungan sistem demokrasi.

Key membagi fungsi partai politik menjadi tiga aspek utama:

1) Partai dalam Elektoral (*Party in the Electorate*)

Partai politik berperan dalam mengorganisasi dan memobilisasi pemilih melalui pemberian label atau identitas yang dapat diadopsi oleh individu. Label ini menyederhanakan pilihan politik bagi pemilih dengan menawarkan perbedaan yang jelas antara kandidat atau kebijakan yang bersaing.

2) Partai sebagai Organisasi (*Party as an Organization*)

Partai politik berfungsi sebagai entitas terstruktur yang bertanggung jawab untuk merekrut kandidat, mengoordinasikan kampanye, dan membangun jaringan anggota partai. Peran organisasi ini memastikan partisipasi yang efektif dalam pemilihan serta pengelolaan sumber daya untuk memengaruhi hasil politik.

3) Partai dalam Pemerintahan (*Party in Government*)

Partai politik memiliki peran sentral dalam pembentukan dan pemeliharaan pemerintahan. Partai mengoordinasikan tindakan anggotanya di lembaga legislatif, sehingga memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan platform partai.

Menurut V.O. Key Jr. fungsi partai politik menekankan pentingnya peran partai dalam merepresentasikan kepentingan publik, menjaga stabilitas politik, dan membentuk tata kelola pemerintahan.

Sedangkan, Katz & Crotty, (2014) mengungkapkan bahwa fungsi partai politik terbagi atas: *Coordination, Contesting Election, Recruitmen dan Representation*. Budiardjo, (2007) menjelaskan beberapa fungsi partai politik sebagai berikut:

1) Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan interest aggregation. Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan.

Partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik yang merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan- kekuatan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isuisu yang meresahkan masyarakat karena

memihak salah satu kelompok (Budiardjo, 2007)

2) Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush dalam Budiardjo, (2007) adalah sebagai berikut : “Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*political socialization maybe defined is the process by which individuals in a givensociety become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena*)”.

3) Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon- calon pemimpin.

4) Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-

kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart dalam Miriam Budiardjo (2007:409) perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat masa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 11 partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik bagi rakyat Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Disisi lain terdapat fungsi partai politik dalam organisasi, Hal ini melibatkan fungsi-fungsi yang dilakukan partai sebagai organisasi politik, atau proses dalam organisasi itu sendiri (Dalton, Russel J., 2000):

- a. Merekrut kepemimpinan politik dan mencari kantor pemerintahan yang mendasar bagi semua definisi klasik sebuah partai politik adalah bahwa partai-partai berusaha

untuk mengendalikan aparat pemerintahan dengan mengajukan calon untuk kantor-kantor politik

- b. Melatih para elit politik. Pemilihan kandidat hanyalah bagian dari peran partai dalam mengembangkan pemimpin yang demokratis
- c. Mengartikulasikan kepentingan politik. Pendekatan struktural- fungsionalis berpendapat bahwa fungsi utama partai adalah untuk mengartikulasikan kepentingan pendukung mereka.
- d. Menggabungkan kepentingan politik. Salah satu perbedaan paling penting antara kelompok kepentingan dan partai adalah bahwa partai tidak hanya mengartikulasikan kepentingan politik tetapi juga menjumlahkannya.

2.2. Rekrutmen Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti pengertian rekrutmen politik adalah untuk seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin pada suatu masyarakat. (Surbakti, 2010). Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Faktor yang mempengaruhi pertimbangan rekrutmen adalah sebuah ukuran tentang bagaimana partai menilai dan mempertimbangkan caleg yang ada. Riswanda Imawan dalam bukunya memaparkan tentang faktor yang mempengaruhi

pertimbangan rekrutmen menurut Kingsley (Wan Asrida dalam Wazni, 2013):

1) Latar Belakang Sosial

Status sosial, ekonomi, dan keluarga calon kandidat mempengaruhi proses rekrutmen. Faktor-faktor ini dapat menentukan apakah calon memiliki latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai partai politik yang bersangkutan.

2) Sosialisasi Politik

Melalui sosialisasi politik, calon kandidat menjadi familiar dengan tugas dan isu yang terkait dengan posisi politik yang diincar. Sosialisasi ini memungkinkan calon untuk mengevaluasi kesiapan dan kemampuannya dalam menempati posisi tersebut, serta mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk peran yang akan diambil.

3) Aktivitas Politik Awal

Pengalaman politik kandidat, termasuk afiliasi dengan kelompok politik sebelumnya, merupakan faktor penting dalam penilaian. Pengalaman ini bisa menjadi kendala atau keuntungan tergantung pada relevansi dan kualitas afiliasi yang dimiliki kandidat, mempengaruhi bagaimana mereka dipersepsikan dalam proses rekrutmen.

4) Magang Politik

Proses "magang" di mana calon elit belajar dari elit yang sudah menjabat merupakan faktor penting dalam memahami mekanisme kerja dan norma-norma yang berlaku di lingkungan politik. Meskipun proses ini memberikan wawasan berharga, ada risiko bahwa reputasi calon bisa "terbenam" jika menggantikan individu dengan reputasi yang lebih tinggi atau sulit untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pendahulu.

5) Variabel Pekerjaan

Pengalaman kerja calon dalam lembaga formal, meskipun tidak selalu terkait dengan politik, dapat menjadi faktor penentu dalam rekrutmen. Kriteria ini mencakup kapasitas intelektual, vitalitas kerja, peningkatan kemampuan, dan pengalaman yang relevan, yang semuanya dapat mempengaruhi penilaian terhadap calon elit.

6) Motivasi

Motivasi calon untuk terlibat dalam politik dapat dipengaruhi oleh harapan akan imbalan pribadi (material, sosial, psikologis) dan tujuan kolektif. Memahami perbedaan antara kebutuhan pribadi dan tujuan publik dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana calon kandidat benar-benar berkomitmen terhadap kepentingan umum dan tidak hanya memanipulasi kebutuhan pribadi menjadi tujuan publik.

7) Seleksi

Mekanisme rekrutmen politik yang transparan mencakup syarat dan prosedur yang memungkinkan seleksi terbuka, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kemampuan elit politik. Proses ini sering melibatkan beberapa tahap penilaian untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih memenuhi kriteria yang ditetapkan dan mampu memenuhi tuntutan peran politik yang akan diemban.

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota- anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat

menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas dimasyarakat. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui suprastruktur dan infrastruktur politik. Setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (*litsus*) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. Dalam perekrutan politik anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik.

Pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik. Pola-pola rekrutmen politik mengungkapkan proses pergeseran ekonomi, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi politik

masyarakat. Hal ini sangat berguna untuk mengukur perbedaan-perbedaan dalam hal pembangunan dan perubahan yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Pembicaraan mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita memasuki sejumlah isu krusial yang bukan saja berfungsi menjelaskan tetapi sekaligus mengizinkan untuk melakukan sejumlah prediksi isu-isu krusial tersebut menyangkut (1) basis legitimasi elit politik (2) rute yang ditempuh ke arah kekuasaan (3) keterwakilan elit politik (4) hubungan antara rekrutmen politik dan perubahan politik (5) akibat-akibat bagi masa depan politik.

Teori Rahat & Hazan, (2010) akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pencalonan di partai politik. Dengan menerapkan teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mengenai struktur, proses, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencalonan kandidat dalam pemilihan legislatif 2024 di Provinsi Lampung, dalam hal ini adalah studi kasus pada partai PKS dan Demokrat.

2.3. Pengertian dan Pola Kandidasi

Kandidasi, atau proses nominasi kandidat, merupakan tahap lanjutan dari rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Tahap ini tidak identik dengan rekrutmen parlemen, melainkan berfungsi secara khusus sebagai proses pencalonan kader partai untuk menjadi calon legislatif dalam pemilihan umum. Mair (1997) menjelaskan bahwa kandidasi adalah proses strategis di mana partai politik menentukan siapa yang akan mewakili mereka, menjadikannya salah satu fungsi utama dalam partai karena hasilnya akan memengaruhi kemampuan partai bersaing di arena elektoral.

Proses ini biasanya melibatkan seleksi yang ketat, mempertimbangkan aspek seperti tingkat keanggotaan, popularitas, serta elektabilitas calon. Menurut Scarrow (1996), meskipun beberapa partai membuka informasi terkait tahapan kandidasi, keputusan akhir sering kali bersifat tertutup dan tidak sepenuhnya transparan. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan kandidat yang diusung tidak hanya memiliki popularitas, tetapi juga kemampuan untuk mengimplementasikan visi dan misi partai.

Firmanzah, (2018) menyebutkan bahwa perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat des/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang

lainnya.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat 4 (empat) hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik (Rahat dan Hazan, 2010), yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?
2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?
3. Dimana kandidat di seleksi?
4. Bagaimana kandidat diputuskan?

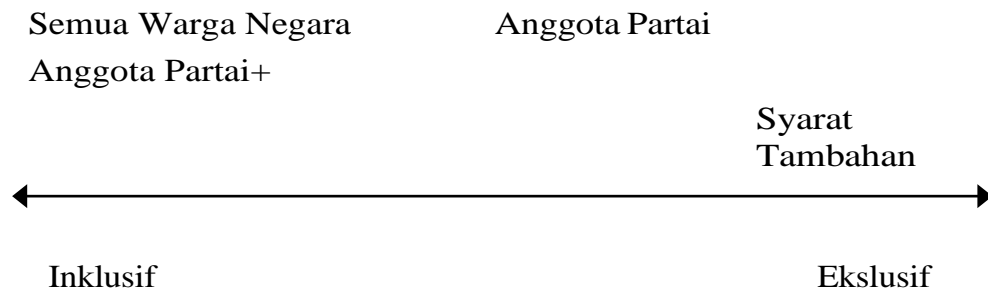
Pembagian inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?

Perlakuan terhadap keempat hal tersebut melahirkan model pengelolaan partai antara pola model inklusif vs eksklusif, sentralistik vs desentralistik, demokratis vs otoriter, dan titik tengah diantara ekstrimitas-ekstrimitas tersebut. Terkait siapa yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas (Lihat Bagan 6.2). Dalam model inklusif, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai.

Pembatasnya hanya regulasi yang ditetapkan negara. Sementara itu, pada model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan- persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah

persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan, dan sebagainya (Pamungkas, 2011).



Gambar 1. Kandidat yang di Seleksi
Sumber: (Hazan, R.Y. & Rahat, 2010)

Menurut Sahid, (2011) terdapat beberapa model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain:

1. Rekrutmen terbuka

Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

2. Rekrutmen tertutup

Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai

itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Rush, M. & Althoff, (2007) bahwa mekanisme rekrutmen politik partai itu dibagi menjadi dua. *Pertama*, rekrutmen terbuka yaitu sistem yang berdasarkan pada ujian terbuka. Cara rekrutmen tersebut sangat kompetitif karena partai politik mampu menilai kemampuan kadernya untuk dapat bersaing di dunia politik dan ini sesuai dengan paham demokrasi yang kita anut. Dengan demikian, rekrutmen terbuka menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian.

Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. *Kedua*, rekrutmen tertutup, yaitu suatu sistem perekrutan yang didasarkan atas *patronase*. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang ditampilkan. Cara ini kurang kompetitif jika dilihat dari prosedurnya. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit untuk memperbaharui legitimasinya di partai. Sehingga kader potensial menjadi terhalang untuk menduduki jabatan tertentu. rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik (Tangkilisan, 2003).

Menurut Miftah Thoha (Tangkilisan, 2003) bahwa ada tiga sistem yang sering digunakan dalam proses rekrutmen.

1. Sistem patronik (*patronage system*). Sistem patronik dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, ikatan kerabat, dan keluarga.
2. Sistem merit (*merit system*). Sistem ini berdasarkan kecakapan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kemampuan seseorang. Penilaian objektif tersebut pada umumnya menggunakan ijazah pendidikan, sistem seperti ini dikenal dengan "*spoil system*".
3. Sistem karir (*career system*). Sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi.

Pippa Norris, sebagaimana dikutip (Sukmajati,dkk 2012) menyebutkan adanya tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Pada tahap sertifikasi dilakukan pendefinisian kriteria siapa saja yang dapat masuk dalam kandidasi. Hal yang mempengaruhi tahap ini misalnya tentang aturan pemilihan, aturan partai, dan norma sosial informal, dan lain-lain. Tahap penominasian meliputi siapa calon yang memenuhi syarat dan dianggap layak untuk dinominasikan. Sedangkan tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Norris menyatakan, banyak calon yang memenuhi syarat, sedikit yang dinominasikan dan sangat sedikit yang sukses.

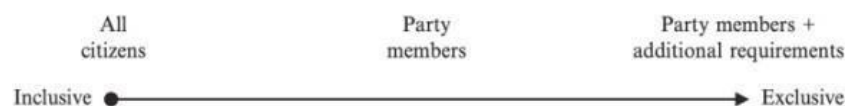
Berdasarkan tahapan dari Norris di atas, Hazan, R.Y. & Rahat, (2010) mengajukan 4 (empat) dimensi metode seleksi kandidat

yang perlu didorong kepada partai politik untuk menjalankan yaitu: (1) Tentang kandidat (*candidacy*), siapa yang dapat dinominasikan, (2) Siapa yang melakukan seleksi (*the selectorate*), (3) Desentralisasi, yaitu dimana seleksi dilakukan (*decentralization*), dan (4) Penunjukan dan Pemungutan suara (*appointment and voting*) untuk memilih kandidat yang dinominasikan. Berikut diuraikan penjelasan tentang keempat dimensi metode seleksi kandidat tersebut:

1. Tentang Kandidat (*Candidacy*)

Dalam metode pemilihan kandidat, dimensi pertama yang harus ditangani adalah pertanyaan pencalonan: Siapa yang dapat dipilih? Walau ini proses yang paling sederhana dari empat dimensi metode pemilihan kandidat; tetapi ini adalah dimensi yang paling kejam/kasar karena berpotensi menghilangkan mayoritas populasi dari kumpulan kandidat.

Perlu dilihat apakah ada batasan dalam menghadirkan pencalonan di partai tertentu? Jika ya, seberapa ketat batasan ini? Seberapa besar pengaruhnya terhadap ukuran dan sifat dari kumpulan kandidat potensial? Perhatian terhadap proses ini memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan pencalonan pada suatu kontinum menurut tingkat inklusivitas atau eksklusivitas, seperti disederhanakan melalui Bagan 2.3.



Gambar 2. Kandidasi

Sumber: Hazan & Rahat (2010)

Dari Gambar 2 tersebut, lahirlah model pengelolaan partai antara antara pola model inklusif vs eksklusif, sentralistik vs desentralistik, demokratis vs otoriter, dan titik tengah di antara

ekstrimitas-ekstrimitas tersebut. Terkait siapa yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusif atau eksklusif. Dalam model inklusif, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Pembatasannya hanya regulasi yang ditetapkan negara. Sementara itu, pada model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan di luar yang ditentukan negara.

Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, di antaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan, dan sebagainya (Hazan & Rahat, 2010). Persyaratan tersebut biasanya secara resmi ditentukan oleh pihak pemerintah atau negara. Adapun persyaratan yang mungkin diajukan partai misalnya keanggotaan partai, popularitas, dan faktor petahana atau bukan.

Seorang petahana bisa jadi tidak dikenakan persyaratan seperti yang harus dipenuhi nonpetahana, karena petahana sudah membuktikan kemenangannya pada periode sebelumnya. Mereka dianggap punya basis dukungan massa yang kuat dan terbukti setia kepada partai politik pengusungnya. Tapi untuk menggairahkan suasana menjelang pemilihan, kehadiran wajahwajah dan darah baru tetap diperlukan oleh partai politik (Hazan, R. Y. & Rahat, 2010).

2. Pihak Penyeleksi (*The Selectorate*)

Dimensi kedua dalam analisis metode pemilihan kandidat ini bertugas mengurangi dan menyeleksi siapa yang akhirnya akan diajukan partai politik dalam pemilihan umum. Merekalah

yang memilih kandidat untuk jabatan publik. Mereka bisa terdiri dari satu orang atau beberapa orang – hingga seluruh pemilih di suatu negara. Sementara setiap kriteria yang digunakan dalam klasifikasi metode pemilihan kandidat memiliki pengaruh yang berbeda pada politik. Pilihlah yang memberikan konsekuensi paling signifikan dan berjangkauan luas pada politisi, partai, dan parlemen lebih dari dimensi pemilihan kandidat lainnya (H a z a n , R . Y . & R a h a t , 2 0 1 0) .

Menurut H a z a n , R . Y . & R a h a t , (2 0 1 0) penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusif dan eksklusif. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam ekstrim yang lain, yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai (Sukmajati dkk 2012)

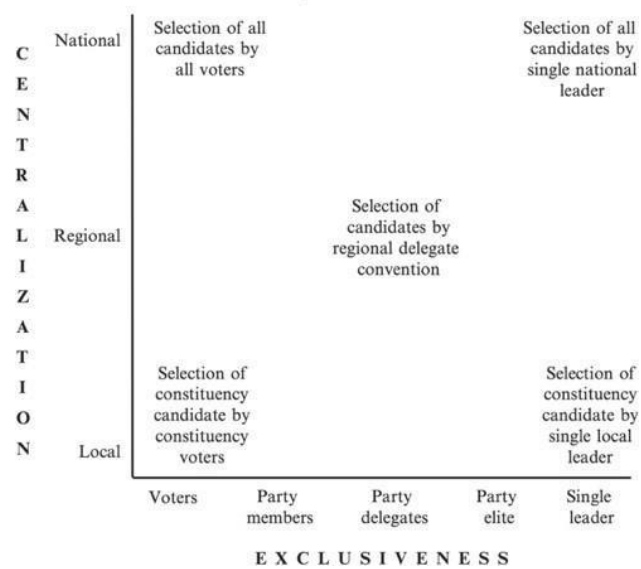
Selanjutnya menurut H a z a n , R . Y . & R a h a t , (2 0 1 0) dalam banyak kasus, partai membuka seleksi mereka secara bertahap, dan itu pun dengan hati-hati yaitu, mereka melibatkan anggotanya dalam seleksi tetapi tidak memberi mereka otoritas tunggal untuk memilih kandidat. Anggota partai adalah satu pemilih dari beberapa yang berpartisipasi dalam seleksi. Mereka mungkin memilih dari daftar pendek yang dirancang oleh pemilih eksklusif kecil (partai-partai Inggris termasuk dalam kategori ini), atau mereka mungkin memiliki suara yang kemudian digabungkan dengan pemilih lainnya (seperti Partai Buruh Selandia Baru). Mereka mungkin juga merupakan satu-satunya pemilih, tetapi keputusan mereka dapat diveto oleh aktor partai lain.

Dalam penelitian yang dilakukan Sukmajati, dkk, (2012) terhadap beberapa partai politik pada Pilkada di Yogyakarta, secara umum, dapat disimpulkan bahwa proses penyeleksian calon kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah berlangsung multistap dan tidak sederhana. Secara umum, tahapan proses tersebut dapat dipilah pada beberapa model: pertama, model penyeleksi berbasis elite partai. Kedua, model penyeleksi berbasis agen partai. Ketiga, model penyeleksi berbasis kombinasi agen dan elite. Keempat, model penyeleksi berbasis agen, elite dan pemilih. Terakhir, model penyeleksi berbasis elite dan pimpinan partai.

3. Desentralisasi (*Decentralization*) Pada dimensi ketiga, pertanyaan yang dimunculkan adalah dimana kandidat diseleksi. Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi (H a z a n , R . Y . & R a h a t , 2 0 1 0) . Pada metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional.

Bagan 2.4 menggambarkan bagaimana tingkat eksklusifitas dibandingkan dengan sentralisasi sebagai dimensi yang terpisah. Derajat desentralisasi ini menjadi ukuran demokratisasi pada suatu partai politik. Menurut Janda (1980), makin dibatasi hak untuk berpartisipasi dalam seleksi kandidat, makin sentralistik partai tersebut. Norris, (2004) melihat dari segi luasnya partisipasi. Suatu proses terdesentralisasi ketika keputusan nominasi di area lokal ada pada semua anggota partai ataupun masyarakat pemilih

(Hazan, R.Y. & Rahat, 2010).



Gambar 3. *Exclusiveness and Centralization as Separate Dimensions*

Sumber: (Hazan, R.Y. & Rahat, 2010)

4. Penunjukan dan Pemungutan suara (*Appointment and voting*)

Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan di antara penyeleksi. Pada sistem pemilihan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Uraian tentang metode seleksi kandidat di atas, digunakan guna mengukur tingkat demokratisasi partai politik. Dalam bahasa Larry Diamond, proses tersebut adalah bagian dari pelembagaan politik (*political institutionalization*) yang meliputi penguatan lembaga partai politik, lembaga legislatif dan sistem pemilu (Diamond, 1996).

Macridis, (1988) menyatakan, “di antara fungsi-fungsi partai politik yang umum dikemukakan adalah representasi (perwakilan), ... rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin...”.

Menurut Hazan, R.Y. & Rahat, (2010) dapat mendefinisikan demokratisasi sebagai perluasan partisipasi baik dalam proses pengajuan maupun proses seleksi yaitu, ketika partai-partai mengadopsi persyaratan pencalonan dan pemilih yang lebih inklusif. Untuk mendemokratisasikan persyaratan pencalonan (kandidasi), partai-partai harus mengurangi pembatasan kelayakan, sehingga menciptakan kumpulan kandidat potensial yang jauh lebih besar, tetapi untuk mendemokratisasikan pemilihan kandidat, pemilih (*the selectorate*) juga harus lebih inklusif.

Inklusifitas pemilih merupakan variabel yang diperlukan untuk mendemokratisasikan metode pemilihan kandidat. Sartori dengan tepat menyamakan demokratisasi dengan “massifikasi” politik, karena massa yang sampai sekarang dikecualikan sekarang diizinkan masuk. Konsekuensi dari demokratisasi intrapartai tersebut dapat dibatasi jika partai masih dapat menggunakan kekuasaan melalui persyaratan pencalonan eksklusif (Hazan, R.Y. & Rahat, 2010)

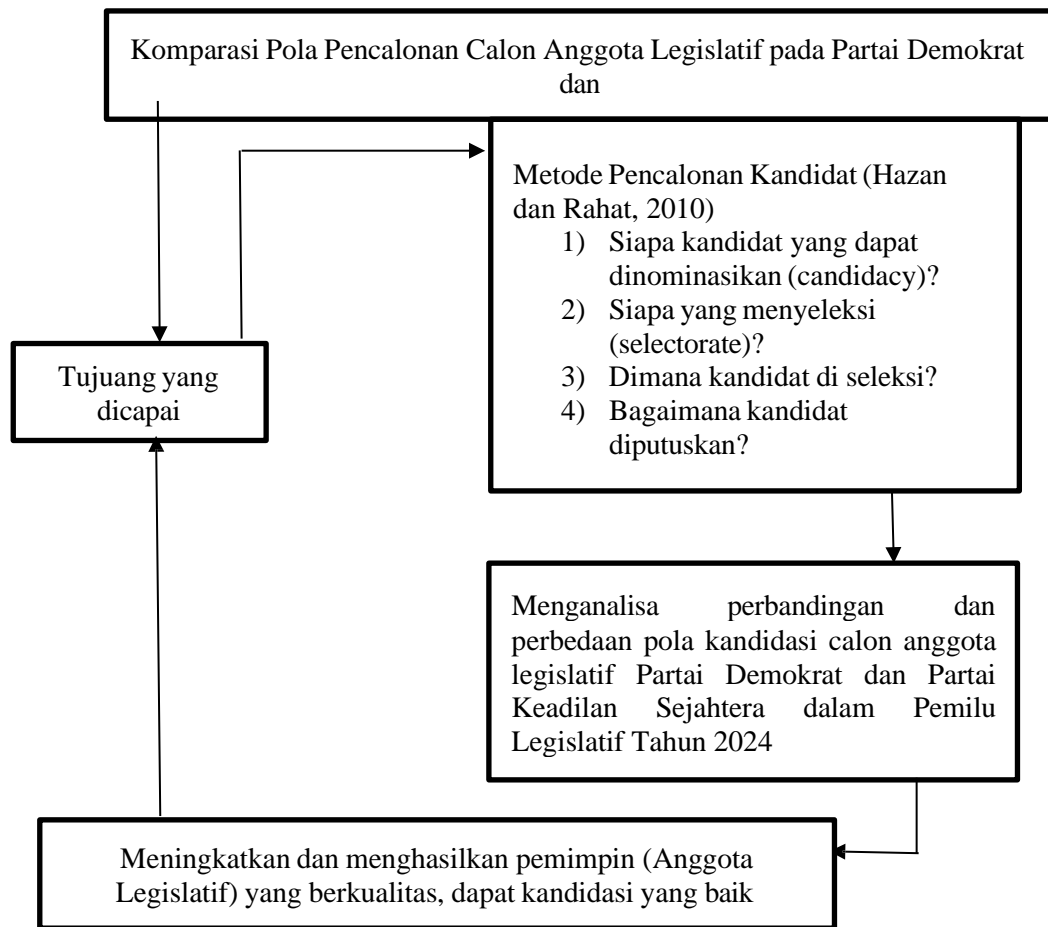
2.4. Kerangka Pikir

Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024, terdapat perbedaan signifikan dalam strategi pengorganisasian antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menarik untuk dianalisis. PKS, yang dikenal dengan struktur organisasi yang kuat dan kaderisasi yang ketat, menghadapi tantangan dalam memperluas basis massa, meskipun telah membangun

militansi dan ideologi yang kokoh. Perolehan suara PKS yang stagnan dalam tiga pemilu terakhir mendorong partai ini untuk bertransformasi menjadi partai terbuka (*catch-all*), meskipun langkah ini berpotensi mengorbankan identitas ideologisnya. Sebaliknya, Partai Demokrat lebih mengandalkan popularitas tokoh dan penguasaan jabatan publik dengan pendekatan personalistik, namun hal ini menjadikan struktur organisasinya rapuh dan kaderisasi yang tidak sistematis.

Proposisi penelitian ini adalah bahwa perbedaan dalam pola kaderisasi dan strategi pengorganisasian antara PKS dan Partai Demokrat akan berdampak pada efektivitas kedua partai dalam Pemilihan Legislatif 2024. Untuk menguji proposisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori seleksi kandidat dari Hazan dan Rahat (2010) yang mencakup empat dimensi: siapa yang dapat dinominasikan (*candidacy*), siapa yang melakukan seleksi (*the selectorate*), tingkat desentralisasi dalam seleksi (*decentralization*), dan mekanisme penunjukan serta pemungutan suara (*appointment and voting*). Hipotesis yang diajukan adalah bahwa meskipun PKS berusaha menjadi partai *catch-all*, partai ini akan tetap mempertahankan elemen kaderisasi yang kuat untuk menjaga kohezi internal dan kesetiaan ideologis, sementara Partai Demokrat yang mengandalkan kekuatan individu akan menghadapi tantangan dalam membangun loyalitas dan kompetensi kader, yang dapat menimbulkan kerentanan terhadap permasalahan internal dan eksternal.

Berdasarkan penjelasan dan uraian teori diatas, peneliti menyajikan bagan kerangka pemikiran seperti dibawah ini :



Gambar 4. Kerangka Pikir
Sumber : Diolah Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang diterapkan pada beberapa partai politik utama di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai, calon anggota legislatif, dan kader partai yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selain itu, data sekunder diperoleh dari artikel-artikel, dokumen resmi partai, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola rekrutmen dan kaderisasi yang berkontribusi terhadap kualitas calon legislatif.

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang bertema Pola Pencalonan Partai Politik Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 (Studi Komparasi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera) menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong & Lexy, 2014).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugianto, 2015). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai

lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2019).

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena fenomena yang diteliti mengenai pola pencalonan partai politik calon anggota legislatif memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Selain itu, penelitian ini membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. Melalui temuan-temuan lapangan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai model pencalonan, dan model penetapan calon anggota legislatif Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menuju Pemilihan Legislatif tahun 2024.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini memfokuskan pada pola pencalonan partai politik calon anggota legislatif pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menuju Pemilihan Legislatif tahun 2024 dengan metode seleksi kandidat meliputi (1) tentang kandidat (*candidacy*), siapa yang dapat dinominasikan, (2) siapa yang melakukan seleksi (*the selectorate*), (3) desentralisasi, yaitu dimana seleksi dilakukan (*decentralization*), dan (4) penunjukan dan Pemungutan suara (*appointment and voting*) untuk memilih kandidat yang dinominasikan.

Dibawah ini penelitian sajikan tabel fokus penelitian berdasarkan uraian diatas, yaitu:

Tabel 2. Fokus Penelitian

Kajian	Fokus Penelitian
Kandidasi Calon Anggota Legislatif	Bagaimana metode proses pencalonan Anggota Legislatif pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Apakah menggunakan metode seleksi kandidat 1)Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (<i>Candidacy</i>)? 2)Siapa yang menyeleksi (<i>Selectorate</i>)? 3)Dimana kandidat di seleksi? 4)Bagaimana kandidat diputuskan?
Perbandingan Kandidasi	Bagaimanakah perbandingan pola kandidasi antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

3.3. Informan Penelitian

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong & Lexy, 2017).

Selain itu, dalam memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *verstehen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Fuad, Anis & Nugroho, 2014).

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Teknik ini digunakan dengan tujuan memilih informan secara obyektif dan refresentatif, sehingga data yang dihasilkan dapat proposional dan akurat. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, maka informan yang akan dipilih adalah memiliki kriteria sebagai berikut: informan merupakan struktural partai meliputi DPP maupun DPW Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Struktural partai merupakan orang yang memahami strategi, syarat dan prosedur tentang penjaringan calon kepala daerah, seperti AD/ART partai yang peneliti butuhkan sebagai data penelitian. TIM rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera merupakan orang yang langsung terlibat dalam proses seleksi calon anggota legislatif Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Profesional atau Pengamat Politik dalam hal ini orang yang aktif terlibat dan mengetahui perpolitikan. Dalam hal ini, data yang dihasilkan berdasarkan wawancara akan peneliti jadikan sebagai data penguat atau sebagai perbandingan dengan data-data yang peneliti peroleh dari struktural dan tim rekrutemn. Terakhir informan adalah bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung.

Berdasarkan penjelasan di atas, informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

Kode	Jabatan	Data yang akan dicari
IF01.1	Bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera	Strategi yang digunakan dalam percalonan balon legislatif serta tahapan-tahapan kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera
IF01.2	Bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera	Strategi yang digunakan dalam percalonan balon legislatif serta tahapan-tahapan kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera
IF01.3	Bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera	Strategi yang digunakan dalam percalonan balon legislatif serta tahapan-tahapan kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera
IF02	DPP Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera	Strategi yang digunakan dalam pencalonan calon anggota legislatif pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menuju Pemilihan Legislatif tahun 2024
IF03	DPW Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera	Strategi yang digunakan dalam pencalonan calon anggota legislatif pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menuju Pemilihan Legislatif tahun 2024

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

3.4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data (Sugiyono, 2019):

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer telah diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus partai, calon anggota legislatif, dan kader partai. Informan tersebut dipilih dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan

berdasarkan relevansi mereka terhadap topik penelitian. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Hasil dari wawancara ini menjadi sumber utama yang digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai proses kaderisasi dan pencalonan dalam partai yang diteliti.

2. Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data sekunder untuk mendukung dan melengkapi informasi yang telah diperoleh. Sumber-sumber data sekunder yang telah digunakan meliputi artikel-artikel dari surat kabar, majalah, dan website. Selain itu, dokumen-dokumen resmi seperti syarat pencalonan, nama-nama calon, serta peraturan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai juga telah dianalisis. Data sekunder ini telah diintegrasikan dengan data primer untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika partai dalam proses kaderisasi dan pencalonan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2019). Mc Milan dan Schumacher mengemukakan beberapa instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam dan dokumen dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi Suharsaputra, (2014) sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. (Barakso et al., 2014) mendefinisikan wawancara adalah

“interviewing is perhaps the core research methodology used in most small-n research. Interviews might be held with political leaders, social movement participant, civil servants. Or any variety of public and/or political actor”

Terkait penelitian ini, Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik semi terstruktur dalam pengumpulan datanya berdasarkan pedoman wawancara yang telah peneliti buat. Peneliti akan mewawancarai informan secara lebih terbuka, bertujuan supaya informan dapat memberikan data yang lebih luas berdasarkan pendapat dan ide-idenya. Hal ini dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan penelitian seperti telah peneliti uraikan di sub bab informan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif (Satori, D. & Komariah, 2020). Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan pancra indra lainnya. Teknik observasi berguna untuk

menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, dimaksud sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan peneliti (Bungin, 2015).

Pemilihan observasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan dilakukannya observasi untuk mendapatkan data-data melalui pengamatan yang dilakukan diluar proses wawancara sebagai data tambahan di dalam data primer penelitian. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi dan mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan (Bungin, 2015).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017). Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari DPP dan DPW Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera berupa data AD/ART Partai dan Peraturan Partai. Tim Pencalonan Calon Anggota Legislatif berupa, persyaratan pencalonan dan nama- nama pendaftar.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Editing Data

Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin (Narbuko & Achmadi, 2016). Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi, 2012). Penelitian ini akan menjabarkan data yang ada melalui tahap editing kemudian diberikan penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017). Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy, (2017) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Miles. et al., 2014) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*displaydata*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari melakukan peninjauan data primer dari hasil wawancara dan

dianalisis dengan menggunakan teori rekrutmen dan kaderisasi parpol untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dan didukung dengan data sekunder penelitian. Setelah dianalisis, proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi. Pengolahan data dimulai dengan pencatatan data mentah kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Data dianalisis lalu diperiksa keabsahannya kemudian dibuat sebuah kesimpulan.

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2019). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik serta teori (Moleong & Lexy, 2014). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber peneliti menggunakan berbagai sumber seperti AD&ART Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tentang pola pencalonan calon anggota legislatif pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menuju Pemilihan Legislatif tahun 2024. Selain itu terdapat dokumen, arsip dan berita online.

2. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan pencalonan calon anggota legislatif pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menuju Pemilihan Legislatif tahun 2024.

IV. GAMBARAN UMUM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen politik di Indonesia masih diwarnai oleh praktik pragmatis, termasuk politik uang dan nepotisme, yang berpotensi menurunkan kualitas calon legislatif. Kaderisasi di beberapa partai politik masih belum optimal, dengan penekanan yang lebih besar pada popularitas dan loyalitas daripada kompetensi dan kapabilitas. Temuan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi partai politik dalam upaya memperbaiki kualitas calon legislatif dan menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

4.1. Partai Demokrat

4.1.1 Sejarah berdirinya Partai Demokrat

Berdasarkan pada Anggaran Dasar, Partai Demokrat secara resminya lahir pada hari minggu tanggal 9 September 2001 dengan inisiator utama yakni Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disingkat SBY). Pembentukan Partai Demokrat tidak terlepas dari peristiwa kekalahan SBY pada pemilihan wakil presiden untuk mendampingi presiden Megawati dalam Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. SBY pada waktu itu memperoleh 90 suara dari anggota MPR. Namun, hal tersebut tidak cukup mengantarkan dirinya menjadi wakil presiden karena kalah dengan Hamzah Haz yang akhirnya menjadi wakil presiden terpilih.

Peristiwa kekalahan tersebut setidaknya memberi hikmah berupa indikasisinyal yang cukup positif terkait popularitas dari sosok SBY di masyarakat yang mungkin menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa akan datang.

Berdasarkan hal itu, pendukung SBY memikirkan tentang ide besar untuk mencalonkan SBY sebagai presiden pada pemilu selanjutnya. Berangkat dari pemikiran tersebut, beberapa anggota MPR dan tokoh masyarakat yang mendukung SBY berinisiatif untuk mendirikan partai politik sebagai kendaraan politik bagi SBY. Gagasan besar pendirian partai ini pun tidak terlepas pada individu dari SBY sebagai orang yang akan diusung pada pemilu nantinya.

Berdasarkan pada gagasan besar tersebut, Perumusan konsep dasar dan *platform* partai demokrat pun dilakukan oleh Tim Krishna Bambu Apus yang dikoordinatori oleh Kurdi Mustofa dan dibantu oleh Vance Rumengkang sebagai pelaksana teknis administrasi. Akhirnya terbentuklah tim 9 yang beranggotakan 10 orang untuk mendiskusikan tentang pendirian partai politik serta konsep pematangannya. 10 anggota tersebut antara lain Vance Rumengkang, Dr. Ahmad Mubarok, M.A., Drs. Yani Wachid (Alm), Prof. Subur Budisantoso, Prof. Darjidarmodiharjo, Prof. Rizal Max Rompas, Prof. T. Rusli Ramli, Prof. Irzan Tandjung, Prof. RF Saragih, RMH. Horoe Syswanto Ns.

Konsep pendirian partai politik tersebut kemudian dimatangkan melalui rapat-rapat yang dilakukan secara berkala dipimpin langsung oleh SBY. Dari hasil rapat pertemuan tersebut, Vance Rumengkang menyatakan bahwa akan meneruskan rencana pendirian partai dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY. Setelah beberapa kali mengadakan rapat dandiskusi, disepakati untuk mendirikan partai politik yang diberi nama Partai Demokrat.

Berdasarkan dari kesepakatan tersebut, Akhirnya pada tanggal 10 September 2001 partai demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM oleh Vance Rumengkang, Suthan Bathoegana dan kawan-kawan dengan jumlah anggota yang didaftarkan sebanyak 99 orang. Pada stuktur partai demokrat yang didaftarkan disepakati bahwa Prof. Subur Budisantoso sebagai pejabat ketua umum, Prof. Irsan Tandjung sebagai pejabat sekretaris jendral, dan Vance Rumengkang sebagai bendahara umum. Kemudian pada tanggal 25 September terbit surat keputusan dari Departemen Kehakiman dan HAM tentang pengesahan Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik di Indonesia. Akhirnya Partai Demokrat resmi dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2002.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya partai demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman peraturan sementara bagi partai demokrat. Pada tahun 2003, diadakan koreksi dan revisi terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan HAM. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga mungkin nantinya adanya perubahan pada kongres nanti. (Sumber: berdasarkan (<https://www.demokrat.or.id/>, n.d.).

4.1.2 Asas, Doktrin, Sifat, Ideologi, dan Tujuan Partai Demokrat
Partai Demokrat merupakan partai yang dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober 2002. Namun, secara umum

Partai Demokrat telah didirikan sebagai partai politik pada tanggal 9 September 2001. Partai Demokrat berasaskan Pancasila dan mengusung ideologi nasionalis-religius, sebuah jalan tengah antara blok nasionalisme dan blok agama, humanisme dan pluralisme, serta demokrasi (Urbaningrum, 2010). Ideologi nasionalisme-religius partai demokrat tersebut ditunjang dengan doktrin tri pakca gatra praja sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan partai. Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam membangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.

Kesesuaian doktrin dan ideologi dari partai demokrat tercermin dalam bentuk lambang partai. Partai Demokrat sendiri memiliki lambang yang berupa gambar bintang tiga yang bersinar tiga arah dengan warna merah putih. Bintang bersegitiga berwarna merah putih tersebut memiliki makna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan yakni:

- a) Nasionalisme-religius, yang bermakna wawasan nasionalis serta sekaligus bermoral agama.
- b) Humanisme, yang bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bagian integral dari masyarakat dunia.

- c) Pluralisme, yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, serta keberadaan ciri khas setiap daerah yang menyatu sebagai bangsa indonesia.

Partai Demokrat sebagai partai politik bersifat terbuka untuk semua warganegara Indonesia tanpa membedakan suku bangsa, ras, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Partai Demokrat juga mengusung etika politik atau slogan yang dikenal sebagai bersih, cerdas, santun. Kemudian dalam tujuannya partai demokrat memiliki 4 tujuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yakni sebagai berikut:

- a) Menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan
- b) Mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945
- c) Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme
- d) Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintah yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera, maju, dan modern dalam suasana aman serta penuh

kedamaian lahir dan batin. (Sumber: (<https://www.demokrat.or.id/>, n.d.)).

4.1.3 Susunan Struktur Organisasi Partai dan Keanggotaan Partai
Hakikatnya sebagai salah satu partai politik yang berkancah dalam dinamika perpolitikan nasional, setiap partai politik memiliki susunan struktur organisasi partai dengan tingkatan yang berbeda-beda baik dari tingkatan pusat hingga tingkatan daerah. Tujuannya adalah agar kebijakan dan program partai politik dapat terserap disemua daerah dan berjalan lancar dalam aktivitasnya. Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik nasional juga memiliki susunan struktur organisasi partai. Susunannya adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Dewan Pimpinan Pusat merupakan dewan pimpinan tertinggi sebagai pelaksana kongres serta memimpin semua kegiatan partai.

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

Dewan Pimpinan Daerah merupakan dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, kebijakan dewan pimpinan pusat, keputusan musyawarah daerah serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat daerah.

c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

Dewan Pimpinan Cabang merupakan dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah, musyawarah cabang serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat cabang.

d. Pimpinan Anak Cabang (PAC)

Pimpinan Anak Cabang merupakan dewan pimpinan partai

sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah anak cabang serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat anak cabang.

e. Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN)

Dewan Perwakilan Luar Negeri merupakan dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, keputusan musyawarah dan rapat-rapat perwakilan luar negeri serta memimpin semua kegiatan partai di perwakilan luar negeri.

f. Pimpinan Ranting

Pimpinan ranting adalah pimpinan partai di tingkat kelurahan atau desa. Pimpinan ranting sendiri merupakan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan kongres, peraturan organisasi, Keputusan musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah anak cabang, serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat anak ranting. Sesuai dengan sifat partai demokrat yang terbuka bagi semua warga negara serta untuk menunjang berjalannya organisasi partai, tentunya Partai Demokrat tidak dapat dilepaskan dari peran anggota-anggotanya.

Peran anggota partai sangat penting dalam mengisi struktur organisasi partai dan menjalankan kegiatan Partai Demokrat. Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pasal 11 dinyatakan bahwa yang dapat diterima anggota Partai Demokrat adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dinyatakan menjadi anggota Partai Demokrat, setiap anggota memiliki kewajiban yakni:

- a. Menghayati, mengamati, serta mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga
- b. Menghayati, mengamati dan mengamalkan keputusan partai yang telah ditetapkan dengan sah dan menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh dewan pimpinan partai berdasarkan keputusan tersebut
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.

Selain memiliki kewajiban yang harus ditaati, anggota partai Demokrat juga memiliki hak. Hak anggota antara lain:

- a. Mengikuti kegiatan partai yang diperuntukkan untuk seluruh anggota
- b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus partai atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh partai
- c. Memberikan usul, saran, atau koreksi kepada dewan pimpinan partai dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme partai.

Pada perjalanannya hingga saat ini, Partai Demokrat sudah mengalami pergantian ketua umum sebanyak empat kali semenjak diresmikan sebagai partai politik. Empat kali pergantian tersebut antara lain:

- a. Pada periode 2001-2005 dijabat oleh Prof. Subur Budi Santoso
- b. Pada periode 2005-2010 dijabat oleh Hadi Utomo
- c. Pada Periode 2010-2013 dijabat oleh Anas Urbaningrum
- d. Pada Periode 2013-2020 dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

e. Pada Periode 2020 – sekarang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono

4.1.4 DPD Partai Demokrat Lampung

DPD Partai Demokrat Lampung merupakan kepanjangan tangan dari DPP Partai Demokrat untuk wilayah Lampung. Saat ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Lampung, Edy Irawan Arief. Dalam menjalankan roda organisasinya, DPD Partai Demokrat Lampung bertempat di Jalan Jl. Cut Nyak Dien No.20-64, Durian Payung, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119.

DPP Demokrat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38/SK/DPP. PD/DPD/II/2022 tentang Susunan Kepengurusan DPD Demokrat Lampung yang ditandatangani Agus Harimurti Yudhoyono. Pengurus Demokrat Lampung Periode 2021-2026 yang dipimpin Edy Irawan Arief.

Tabel 4. Susunan Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung

No	Nama Pengurus	Jabatan
1	Edy Irawan Arief	Ketua
2	Raden Muhammad Ismail	Wakil Ketua
3	Kherlani, Hanifal, I Wayan Dhirpa	Wakil Ketua
4	Asep Makmur	Wakil Ketua
5	Eria Desemsoni	Wakil Ketua
6	Hengki Malonda	Wakil Ketua
7	Syarifah	Wakil Ketua
8	Ko Marhaen Agus Revolusi	Sekretaris
9	Sugeng Dwiono	Wakil Sekretaris

10	Mustopa Endi Saputra Hasibuan	Wakil Sekretaris
11	Dian Purnama	Wakil Sekretaris
12	Mainar Rusmala Dewi	Wakil Sekretaris
13	Rezki Wirmandi	Wakil Sekretaris
14	Muhammad Junaidi	Wakil Sekretaris
15	Zainun AR	Wakil Sekretaris
16	Esmail Nawawi	Direktur Eksekutif Daerah
17	Ellya Saleh	Wakil Direktur Eksekutif Daerah
18	Surya Wirawan	Wakil Direktur Eksekutif Daerah
19	Yozirizal	Bendahara
20	Epi Parela	Wakil Bendahara
21	M Rustam Haris	Wakil Bendahara
22	Yuverlina	Wakil Bendahara
23	Masputra	Wakil Bendahara
24	Mungliana Susanto	Wakil Bendahara
25	Nur Renaldo	Wakil Bendahara
26	Amaluddin	Badan Pemenangan Pemilu Daerah (
27	Midi Ismanto.	Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Daerah
28	Nerzely Agung Putra	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
29	Deni Ribowo	Badan Komunikasi Strategi Daerah
30	Angga Satria Pratama	Badan Doktrin Pendidikan Pelatihan Daerah
31	Agusman Arief	Badan Pembinaan Jaringan Konstitusi Daerah
32	Munzir	Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah
33	Agus Susanto	Badan Hukum dan Pengamanan Partai Daerah
34	Hanifal	Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung

Diolah oleh Peneliti (2024)

Sebagai salah satu kepanjangan tangan partai demokrat di tingkatan daerah partai demokrat memilikikewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan kongres, keputusan rapat tingkat nasional, keputusan musyawarah daerah, keputusan rapat tingkat daerah, dan peraturan partai
- b. Memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman tentang kegiatan Fraksi DPRD Provinsi
- c. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada dewan pimpinan partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta ketentuan-ketentuan organisasi
- d. Menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Partai Daerah dan DPP
- e. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada musyawarah daerah. Selain memiliki kewajiban dalam menjalankan kegiatan partai di tingkatan daerah, DPD Partai Demokrat Lampung juga memiliki hak sebagai berikut:
 - a) Membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai di daerah dalam rangka pelaksanaan keputusan musyawarah daerah
 - b) Memberhentikan fungsionaris DPD melalui rapat pleno DPD dan dilaporkan dalam rapat pimpinan daerah serta mengajukan penggantinya untuk ditetapkan oleh DPP
 - c) Tata cara pemberhentian dan pengangkatan fungsionaris DPD, lebih lanjutdiatur dalam peraturan organisasi
 - d) Menerima atau menolak ketetapan rapat pleno DPC dan PAC tentang pemberhentian fungsionaris DPC dan PAC

- e) Membatalkan keputusan DPC dan PAC atau musyawarah cabang dan musyawarah anak cabang melalui rapat pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah daerah, atau membahayakan partai, negara dan bangsa
- f) Bertindak mewakili partai dalam melaksanakan di daerah dan mengadakan hubungankerjasama serta persahabatan dengan organisasi lainnya

4.1.5 Keikutsertaan Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum

Keikutsertaan Partai Demokrat dalam pemilihan umum dimulai pada tahun 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan langkah awal partisipasi Partai Demokrat terjun ke dalam pesta demokrasi di Indonesia. Partai Demokrat yang saat itu masih berumur sekitar 3 tahun sejak didirikan pada tahun 2001 telah banyak menarik simpati rakyat dalam hal elektabilitas sebagai partai baru. Terbukti, pada keikutsertaannya sebagai partai politik yang mengusung gagasan nasionalis-religius tersebut berhasil mendapat dukungan suaranya sekitar 7,45%.

Hasil tersebut merupakan pencapaian prestasi yang cukup membanggakan bagi Partai Demokrat. Bermula dari suara tersebut, Partai Demokrat kemudian mengusung calon presiden mereka Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengikuti pemilihan presiden dan berhasil memenangkannya.

Prestasi yang berkibar pada tahun 2004 tersebut kemudian berlanjut pada pemilu selanjutnya yakni pada tahun 2009. Pada pemilu 2009 Partai Demokrat berhasil mengukuhkan diri sebagai partai pemenang pemilu. Perolehan yang suara

Partai Demokrat melonjak drastis dari hasil sebelumnya. Partai demokrat secara nasional berhasil meraup suara nasional sebanyak 21.655.295 suara atau dengan jumlah persentase secara nasional sebanyak 20,81% dari suara sah nasional (Sumber: KPU). Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu 2009 semakin sempurna dikarenakan presiden SBY berhasil memenangkan pemilihan presiden.

Berbicara kesuksesan partai demokrat pada pemilu 2004 dan 2009 secara nasional tentunya tidak terlepas dari peran-peran partai demokrat di tingkat lokal seperti DPD Provinsi Lampung. Selain berhasil membantu perolehan suara secara nasional, DPD Partai Demokrat juga berhasil menghantarkan 6 calon legislatifnya pada pemilu 2004 menduduki kursi DPRD Provinsi Lampung serta berhasil menghantarkan 14 calon legislatifnya pada pemilu 2009. Pada pemilu 2014 ini DPD Partai Demokrat mengajukan 83 calon legislatifnya untuk maju dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan bersaing di delapan daerah pemilihan.

- 4.1.6 Aturan Partai Demokrat dalam Rekrutmen Calon Legislatif Partai Demokrat yang merupakan pemenang pemilu pada 2009 lalu mengeluarkan aturan yang dijadikan bahan pedoman bagi tingkatan pusat hingga pada tingkatan daerah pada mekanisme perekrutan calon legislatifnya. Dalam hal ini pertimbangan Partai Demokrat mengeluarkan SK DPP Nomor 127/SK/DPP.PD/VIII/2012 tentang juklak dan juknis mekanisme penjaringan bakal calon anggota legislatif. Keluarnya Juklak-juknis tersebut didasarkan pada Partai Demokrat partai pemenang pemilu 2009 dengan mengantarkan 149 kursi anggota legislatif dengan komposisi 24% atau 36 kursi dari jumlah tersebut dicapai oleh perempuan.

Kemudian hal lainnya berkaitan harapan Partai Demokrat mempunyai target memperoleh suara 30% pada pemilu sesuai amanat kongres ke-2 di Bandung.

Aturan yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat tersebut ditujukan pada pemilu legislatif 2014. Partai Demokrat mempunyai target 30% suara sebagaimana yang diamanakan kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung. Untuk itu, visi dan persepsi pengurus Partai Demokrat di semua tingkatan seluruh Indonesia perlu disamakan. Untuk memperoleh target tersebut, maka diperlukan langkah-langkah taktis dan konkrit dalam penjaringan calon anggota legislatif dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota, dengan berdasar pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis tentang mekanisme penjaringan calon anggota legislatif, sebagai berikut:

1. Sumber dan kuota bakal calon

1) Untuk DPR-RI

- a. Seluruh anggota DPR RI periode 2019-2024 sesuai yaitu sebanyak 148 orang sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing.
- b. Pengurus DPD Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- c. Kader Partai Demokrat dari daerah sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- d. Kader-kader organisasi sayap Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan

kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan

- e. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, pengusaha, mantan birokrat sipil dan TNI-Polri yang sejalan dengan Visi, Misi dan garis perjuangan Partai Demokrat.
- f. Rekrutmen pada cara point (a) sampai dengan (e) memperhatikan keterwakilan keberempuan minimal 30%.

2) Untuk DPRD Provinsi

- a. Seluruh anggota DPRD Provinsi periode 2019- 2024 sesuai dengan provinsi dan daerah pemilihannya masing-masing.
- b. Pengurus DPD Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- c. Kader Partai Demokrat dari daerah sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- d. Kader-kader organisasi sayap Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
- e. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, pengusaha, mantan birokrat sipil dan TNI-Polri yang sejalan dengan Visi, Misi dan garis perjuangan Partai Demokrat

- f. Rekrutmen pada cara point (a) sampai dengan (e) memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.

3) Untuk DPRD Kabupaten/Kota

- a. Seluruh anggota DPRD Provinsi periode 2019- 2024 sesuai dengan provinsi dan daerah pemilihannya masing-masing.
 - b. Pengurus DPD Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
 - c. Kader Partai Demokrat dari daerah sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan.
 - d. Kader-kader organisasi sayap Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan
 - e. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, pengusaha, mantan birokrat sipil dan TNI-Polri yang sejalan dengan Visi, Misi dan garis perjuangan Partai Demokrat
 - f. Rekrutmen pada cara point (a) sampai dengan (e) memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.
2. Bagi anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota periode 2019- 2024 dapat mengajukan perpindahan dan peningkatan daerah pemilihan atas permintaannya sendiri.

3. Kriteria pencalonan bakal calon pada daerah pemilihan di setiap tingkatan:
 - 1) Posisi struktural partai
 - 2) Sejarah dan perjuangan jasa di partai
 - 3) Sejarah pelatihan partai
 - 4) Tingkat Pendidikan
 - 5) Hubungan sosial dan kultural
 - 6) Ketokohan
 - 7) Keaktifan dalam kegiatan partai dan kemasyarakatan
 - 8) Integritas pribadi
 - 9) Kemampuan operasional

4. Pengurus Partai adalah:
 - 1) Kader Partai Demokrat yang ditetapkan dalam surat keputusan, sesuai dengan hasil kongres dan hasil musyawarah- musyawarah dalam setiap tingkatan
 - 2) Aktif melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sejak ditetapkan
 - 3) Menunjukkan hasil kerja politik di partai secara berkesinambungan, berhasil guna, konkret, terarah, terukur dan dapat dibuktikan.

5. Anggota Legislatif adalah:
 - 1) Aktif dalam lembaga legislatif
 - 2) Memperjuangkan aspirasi, peduli partai dan masyarakat
 - 3) Peduli terhadap konstituennya dengan melakukan

kegiatan konkrit kepada masyarakat maupun kepada kader partai pada saat kunjungan kerja dan tugas lain ke daerah maupun ke daerah yang akan diwakilinya nanti pada periode berikutnya.

6. Tokoh Masyarakat adalah:
Anggota masyarakat yang memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang signifikan dalam perolehan/penambahan kursi legislatif dan kepedulian terhadap Partai Demokrat di daerah maupun dari asal daerah dimana dia akan ditetapkan
7. Apabila dalam penjaringan bakal calon legislatif sesuai dapil dan tingkatannya melebihi kuota maka pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya mengajak/membicarakan dengan bakal calon legislatif yang baru (bukan anggota legislatif aktif periode 2019- 2024) untuk dapat mengisi kuota yang masih kosong dimana yang bersangkutan masih mendapatkan peluangsuara masyarakat sesuai dengan kedekatan hubungan emosional dan kultural.
8. Tim Korwil, Korda, dan Korcab dengan pengurus - pengurus daerah bersama bakal calon legislatif setiap dapil sesuai tingkatannya melakukan kegiatan pencitraan dan penggalangan masyarakat minimal 2 (dua) kali setiap bulannya, dan memberikan laporan kepada DPP Partai Demokrat dan pimpinan Partai Demokrat sesuai tingkatannya.
9. Dalam rangka program pencitraan dan penggalangan masyarakat di setiap dapil bakal calon anggota legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota perlu membuat pemetaan dan pembagian zona/wilayah

dari setiap calon anggota legislatif untuk menghindari tumpang tindih zona/wilayah dari dapil masing-masing sesuai tingkatannya agar menyebar dan bersinergi (tidak berebutan) pada zona/wilayah yang terdiri dari Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa, Kampung/Dusun, Lingkungan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) sehingga berhasil guna untuk memperoleh suara yang menyebar, terdistribusi dengan baik kepada setiap calon anggota legislatif dari Partai Demokrat.

Dengan demikian, hal ini dapat menghindari perebutan suara yang tumpang tindih (berebutan) dari masyarakat untuk calon anggota legislatif dari sesama Partai Demokrat (untuk diketahui bahwa partai lain juga akan melakukan perebutan suara dari masyarakat sesuai dengan zona/wilayah tersebut di atas).

10. Apabila kegiatan pencitraan dan penggalangan masyarakat tidak sesuai dengan harapan maka korwil, korda, dan korcab dengan pengurus partai dari dapil sesuai tingkatannya tersebut melakukan evaluasi terhadap bakalcalon legislatif yang telah ditetapkan
11. Dalam rangka kinerja masing-masing dapil untuk DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus membuat konsesus pembiayaan operasional partai secara holistik antara lain: biaya kampanye, saksi dan lain-lain secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.
12. Dalam rangka pencapaian target 30%, tertib administrasi

dan asas kepastian susunan bakal calon anggota legislatif untuk DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan kepada DPP Partai Demokrat selambat- lambatnnya 30 hari kalender untuk diverifikasi secara nasional sebelum didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

4.1.7 Daftar Nama Calon Anggota Legislatif Tetap Partai Demokrat Pada Pemilu 2024

DPW Partai Demokrat Lampung dalam menghadapi pemilu 2024 mengusung sebanyak 84 calon anggota legislatif yang terbagi kedalam 8 daerah pemilihan di Provinsi Lampung, beberapa calon tersebut diantaranya:

Tabel 5. Calon Legislatif Dapil 1

Dapil	No. Urut	Nama
LAMPUNG 1	1	BUDIMAN A. S.
LAMPUNG 1	2	NETTYLIA SYUKRI
LAMPUNG 1	3	LISMAINI
LAMPUNG 1	4	MAKMUR PUTRA JAYA
LAMPUNG 1	5	HETTY PUJI LESTARI
LAMPUNG 1	6	DONI ARVADO
LAMPUNG 1	7	SOBRIANSYAH
LAMPUNG 1	8	DONY HANDOKO
LAMPUNG 1	9	ZAINUN A.R.
LAMPUNG 1	10	NEROZELY AGUNG PUTRA

Jumlah total DCT Dapil :10

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 6. Calon Legislatif Dapil 2

Dapil	No. Urut	Nama
LAMPUNG 2	1	MUHAMMAD JUNAIDI
LAMPUNG 2	2	DIAN MULYANI
LAMPUNG 2	3	MIRANTI KARIM SANUSI
LAMPUNG 2	4	MUHAMMAD YANUAR FIRMANSYAH
LAMPUNG 2	5	SINDI ALFIANA HARAHAP

LAMPUNG 2	6	ANDRI SUPRIATNA
LAMPUNG 2	7	SUSIMAH
LAMPUNG 2	8	FERRY SUSANTO
LAMPUNG 2	9	KHAIRUNISA SYAFIRA
LAMPUNG 2	10	SALMAN ALFARIZI

Jumlah total DCT Dapil :10

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 7. Calon Legislatif Dapil 3

Dapil	No. Urut	Nama
LAMPUNG 3	1	ANGGA SATRIA PRATAMA
LAMPUNG 3	2	JOHAN NASRI
LAMPUNG 3	3	MAINAR RUSMALA DEWI
LAMPUNG 3	4	SAFITRI NOVIYANTI
LAMPUNG 3	5	DHIRA SINTYA PUTRI
LAMPUNG 3	6	WINARDI YUSUP
LAMPUNG 3	7	ALDO RIZALDI
LAMPUNG 3	8	OKTAPIANUS
LAMPUNG 3	9	ENIE AUGUS JUNAETY
LAMPUNG 3	10	DARMAWAN
LAMPUNG 3	11	AFFANDI ATMANEGARA A.

Jumlah total DCT Dapil :11

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 8. Calon Legislatif Dapil 4

Dapil	No. Urut	Nama
LAMPUNG 4	1	AMALUDDIN
LAMPUNG 4	2	TAZKIR Z.
LAMPUNG 4	3	AFRIDAWATI
LAMPUNG 4	4	KURNIATI
LAMPUNG 4	5	JOHN KENEDIE
LAMPUNG 4	6	HERLINA
LAMPUNG 4	7	RESTU FEBRIYANI
LAMPUNG 4	8	M. ANGGADA SAPUTRA DILAJA
LAMPUNG 4	9	KEKEN LIANDI R.A.
LAMPUNG 4	10	LINA MARLINA

Jumlah total DCT Dapil :10

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 9. Calon Legislatif Dapil 5

Dapil	No. Urut	Nama
LAMPUNG 5	1	YOZIRIZAL
LAMPUNG 5	2	DENI RIBOWO
LAMPUNG 5	3	PRISRITA ARIEF
LAMPUNG 5	4	ABADI
LAMPUNG 5	5	PARYANTO
LAMPUNG 5	6	NUR AYU IKE ANGGRAINI
LAMPUNG 5	7	HELMI SAAD
LAMPUNG 5	8	GESA DA'IFADILLA
LAMPUNG 5	9	ANGGA RINZANI
LAMPUNG 5	10	AYU PUSPITA SARI
LAMPUNG 5	11	PARDI

Jumlah total DCT Dapil :11

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 10. Calon Legislatif Dapil 6

Dapil	No. Urut	Nama
LAMPUNG 6	1	HANIFAL
LAMPUNG 6	2	SRI HANDAYANI
LAMPUNG 6	3	PAISOL
LAMPUNG 6	4	NAZARUDDIN BURHAN
LAMPUNG 6	5	SYAHRIL ALAM
LAMPUNG 6	6	NADIAH
LAMPUNG 6	7	MUHAMMAD IMAM KHANAFI
LAMPUNG 6	8	MEILINDA RIZANI
LAMPUNG 6	9	AHMAD ARPANDI
LAMPUNG 6	10	MUNZIR

Jumlah total DCT Dapil :10

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 11. Calon Legislatif Dapil 7

Dapil	No. Urut	Nama
LAMPUNG 7	1	MIDI ISWANTO
LAMPUNG 7	2	SINGA ERS AWANGGA
LAMPUNG 7	3	INDRI SULISTYAWATI
LAMPUNG 7	4	YULI FITRI ASTUTI
LAMPUNG 7	5	ULIL AFIDAH
LAMPUNG 7	6	RUSLI YANTO
LAMPUNG 7	7	JASIRUN
LAMPUNG 7	8	DEVY SETIAWATI
LAMPUNG 7	9	SONY PRIYANTO
LAMPUNG 7	10	YESI SEPTIANI
LAMPUNG 7	11	NAZIRA EIQINA
LAMPUNG 7	12	ZUBIR IDHAM

Jumlah total DCT Dapil :12

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 12. Calon Legislatif Dapil 8

Dapil	No. Urut	Nama
LAMPUNG 8	1	MUHAMMAD KHADAFI AZWAR
LAMPUNG 8	2	ASEP MAKMUR
LAMPUNG 8	3	INDRIYANI EKA PELITAWATI
LAMPUNG 8	4	SAMSU HARISON
LAMPUNG 8	5	BAYU WITARA
LAMPUNG 8	6	MANDA AYU RAHMAWATI
LAMPUNG 8	7	SYAIPUDDIN
LAMPUNG 8	8	BAHERAMSYAH
LAMPUNG 8	9	METI RAHAYU
LAMPUNG 8	10	M. INDRA JAYA

Jumlah total DCT Dapil :10

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

4.2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

4.2.1 Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera dikenal dengan partai dakwah berawal dengan sebutan PK (Partai Keadilan). Lahirnya PK pada saat pasca lengsernya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, Partai Keadilan berdiri pada tanggal 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi Pers di aula masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta yang diketuai oleh Nur Mahmudi Ismail. Pemilu pertama di era Reformasi yang diadakan pada tanggal 7 Juni 1999 PK terbukti gagal dalam memperoleh suara (*electoral threshold*) salah satu syarat untuk mengikuti pemilu selanjutnya.

Ketertutupan PK menjadi salah satu penyebab anjloknya suara di pemilu. Yang mana hanya meraih 1,36 persen dari total pemilih 1,4 juta pemilih. Gagal dalam mencapai *electoral threshold* PK bersalin nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada April 2002. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2003 PK menyelesaikan seluruh prosesnya sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS penggabungan ini sekaligus menandai hak milik PK menjadi PKS dengan penggabungan ini Partai Keadilan (PK) resmi berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

DPW PKS Lampung seperti yang tertuang dalam AD/ART PKS 2021 Pasal 25, merupakan forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan penetapan musyawarah nasional, hasil rapat kerja nasional, majelis syura DPP (Dewan Pengurus Pusat) PKS dalam mengatur berbagai kepentingan PKS di wilayah Provinsi Lampung. DPW PKS Lampung tentunya dalam berbagai keputusan yang diambil pada roda

organisasi tersebut tetap berpedoman pada AD/ART PKS berdasarkan hasil dari keputusan Majelis Syura PKS.

Tugas operasional DPW PKS Lampung seperti yang tertuang

dalam AD/ART PKS 2021 Pasal 51 yakni:

- a. Menyosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai;
- b. Melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, politik, dan kepemimpinan.

4.2.2 Struktur Kepengurusan DPW PKS Lampung

Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah seperti yang tertuang dalam AD/ART PKS 2021 Pasal 46 disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Bidang Kaderisasi; dan
- e. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga.

Berikut adalah struktur kepengurusan DPW PKS Lampung periode 2020-2025, yang berarti sudah sesuai dengan AD/ART untuk menjalankan tugas operasionalnya sebagai pengurus ditingkat wilayah Provinsi Lampung:

Ketua	: H Ahmad Mufti Salim, Lc., MA.
Sekretaris	: Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II
Bendahara	: Wakil Bendahara I Wakil Bendahara II

- Bidang :
1. Kaderisasi
 2. Perempuan dan Ketahanan Keluarga
 3. Kepemudaan
 4. Kepaduan
 5. Pemenangan Pemilu dan Pilkada
 6. Hubungan Masyarakat
 7. Politik, Hukum, dan HAM
 8. Kesejahteraan Sosial
 9. Pembangunan Keumatan dan Dakwah
 10. Pemberdayaan Jaringan Usaha dan
 11. Ekonomi Kader
 12. Ketenagakerjaan
 13. Pekerja, Petani, dan Nelayan
 14. Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup
 15. Seni Budaya
 16. Pembinaan dan Pengembangan Desa

4.2.3 Visi dan Misi PKS

1) VISI PKS

Menjadi Partai Islam *rahmatan lil 'alamin* yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) MISI PKS

- a. Meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas,

profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.

- b. Mengokohkan soliditas partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas.
- c. Meningkatkan kepeloporan partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotik.
- d. Memenangkan pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di kawasan, dan pengembangan kerjasama internasional untuk memperkokoh posisi Indonesia.

4.2.4 Falsafah Dasar Perjuangan PKS

Falsafah dasar perjuangan PKS adalah pemikiran mendasar tentang nilai-nilai yang diperjuangkan PKS, hasil dari proses objektifikasi nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam*, dalam memberikan landasan, arah dan tujuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan perumusan falsafah dasar perjuangan PKS adalah:

- a. Rujukan utama dalam proses konsolidasi ideologisasi partai

- b. Pengejawantahan arah perjuangan partai sebagaimana tercantum dalam AD/ART PKS; dan
- c. Acuan dasar para anggota partai dalam berjuang di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Gambar 5. Bagian Falsafah Dasar Perjuangan PKS
Sumber: Falsafah PKS, 2021

4.2.5 Tim Perekrut Calon Anggota Legislatif DPW PKS Lampung

Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada atau yang disingkat BP3 merupakan bidang yang bertugas melakukan perekrutan calon anggota legislatif DPW PKS Lampung, namun tidak hanya BP3 yang bertugas melakukan perekrutan. Terdapat tim khusus yang terbagi ke dalam delapan dapil di Provinsi Lampung yang bertugas melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Tim tersebut diistilahkan sebagai koordinator dapil. Koordinator dapil tersebut ditunjuk langsung oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Lampung,

dengan alasan utama karena delapan nama tersebut berdomisili sesuai dengan daerah pemilihan dan merupakan kader PKS yang dirasa mampu membantu menjaring calon-calon terbaik di daerahnya masing-masing sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PKS. Berdasarkan SK DPW PKS Lampung nomor 29/SKEP/AH-PKS/2023, tim tersebut terdiri dari:

Dapil 1: Raden Cik Awang, SE. Dapil 2: Supriono, S.Si.

Dapil 3: Denny Harnova, S.Si. Dapil 4: Masruhan

Dapil 5: Heri Susanto, ST. Dapil 6: Padami SK

Dapil 7: RM Surya Wijaya Dapil 8: Susilo

4.2.6 Daftar Nama Calon Anggota Legislatif Tetap PKS pada Pemilu 2024

DPW PKS Lampung dalam menghadapi pemilu 2024 mengusung sebanyak 85 calon anggota legislatif yang terbagi kedalam 8 daerah pemilihan di Provinsi Lampung, beberapa calon tersebut diantaranya:

Tabel 13. Calon Legislatif Dapil 1 Kota Bandar Lampung

NO	NAMA
1	Nenden Tresnanursari
2	Ade Utami Ibnu
3	Syarif Hidayat
4	Hendro Sasongko
5	Tri Noviantoro
6	Hanifah Asmawati
7	Sujarwo
8	Edy Hermawan
9	Hartini
10	Yuli Astuti
11	Budi Irawan Hasirin Oku

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 14. Calon Legislatif Dapil 2 Lampung Selatan

NO	NAMA
1	Puji Sartono
2	Agus Kurniawan
3	Murniawati
4	Sabiqul Iman
5	Trisno Ngudi Santoso
6	Sri Subekti
7	Julham Al Ikhwan Nur Assifa
8	M. Yamin
9	Erika Adrianti
10	Maniso

Tabel 15. Calon Legislatif Dapil 3 Pesawaran dan Pringsewu

No	Nama
1	M. Syukron Muchtar
2	Zunianto, M.Pd.I.
3	Hj. Tati, S.E.
4	M. Arifki Zainaro, S.Kep., Ns., M.Kep.
5	Drs. Rustam
6	Zainani, S.Pd.
7	Hilyatus Sholihah, S.Mat.
8	Drs. H Aswari
9	Ipruddin Efendi, S.Si.
10	Seri Istikowati
11	Mulyani, M.Pd.

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2024

Tabel 16. Calon Legislatif Dapil 4 Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat

No	Nama
1	Heni Susilo, S.Pd.
2	Muhammad Iqbal, S.Sos.
3	Maisaratun Zubaidah, S.Pd.
4	Adison
5	H. Pahlawan Usman, S.T.
6	Rina Novinda, S.Pd.
7	Rudiawan, S.Sos.
8	Abizar, S.P., M.E.Sy.
9	Oktaviantimala, S.Pd.
10	Badrus Salam, S.T.

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 17. Calon Legislatif Dapil 5 Waykanan dan Lampung Utara

No	Nama
1	Cucu Mulyono
2	Aziz Muslim Abm, S.Pd., M.Pd.
3	Rosdiana. S,Pd.
4	Agung Utomo, S.Sos.
5	H. Amrullah Bs
6	Aprilia Nurita Sari, S.S.
7	Yunizar Taufik
8	Meidian Riza, S.Si.
9	Sanddy Alif Azzahra
10	Atifah Mukminah, S.Hum.
11	Tasiman

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 18. Calon Legislatif Dapil 6 Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat

No	Nama
1	H. Semin, S.Pd.I., M.Pd.
2	Dra. Hj Sri Puji Astuti
3	Dr. H. Selamat, S.T., M.M.
4	Rendi Ermansyah Putra, S.T., M.T.
5	H. Aristusyah, S.Ag.
6	Suhermawati
7	Restiana, S.P.
8	H. Imlan, S.H., M.H.
9	Budiarjo, S.Pdi., M.Pd.
10	Rifqi Ziyadurrohman, S.Kom.

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 19. Calon Legislatif Dapil 7 Lampung Tengah

No	Nama
1	Muhamad Ghofur
2	Vittorio Dwison
3	Wulan Damayanti
4	Joni Hardito
5	Yulianto
6	Silvia Sace
7	Ahmad Khairudin Syam
8	Dodi Yanto
9	Nur Khoirin Nasihah
10	Erik Yanto
11	Maya Pratiwi
12	As Tumungin

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

Tabel 20. Calon Legislatif Dapil 8 Lampung Timur

No	Nama
1	Yusnadi
2	Dra. Rindang Sari
3	Ismail Ja'far
4	Teguh Suyatman
5	Nur Fauzan
6	Sri Yuheni
7	Umi Fitriyani
8	Ahmad Fuady
9	Nida Rafiqza Izzati
10	Aprilia Fitriningsih

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2024

4.2.7 Daftar Nama Anggota Legislatif PKS Provinsi Lampung Periode 2019-2024

Tabel 21. Anggota Legislatif PKS Prov Lampung Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan
1	Mardani Umar	Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung
2	Zunianto	Wakil Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung
3	Vittorio Dwison	Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi Lampung
4	Puji Sartono	Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung
5	Ismail Jafar	Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung
6	Heni Susilo	Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung
7	Ade Utami Ibnu	Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung
8	Syarif Hidayat	Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung
9	H. Semin	Anggota Fraksi DPRD Provinsi Lampung

Sumber: DPRD Prov Lampung, 2019

4.2.8 Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif PKS Prov Lampung 2024
Tabel 22. Daftar Sementara Anggota Legislatif PKS yang Lolos Pada
Pemilu 2024

NO	Nama	No Urut	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara
1	Ade Utami Ibnu	2	1	13.669
2	Puji Sartono	1	2	19.125
3	Syukron Muhtar	1	3	12.348
4	Heni Susilo	1	4	14.345
5	Amrullah	3	5	12.504
6	Muhammad Ghofur	1	7	13.362
7	Yusnadi	1	8	13.548

Sumber: KPU Prov Lampung, 2024.

Fokus penelitian ini berfokus pada PKS dan Partai Demokrat. Peneliti memberikan beberapa gambaran umum terkait fokus penelitian ini. Partai Demokrat, sejak awal pendiriannya, dikenal sebagai partai yang berorientasi pada nasionalisme moderat dengan visi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi Pemilu 2024, Partai Demokrat cenderung menonjolkan isu-isu seperti pluralisme, demokrasi, dan stabilitas ekonomi, yang ditujukan untuk menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

PKS mengusung ideologi Islam sebagai dasar perjuangannya, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai partai dakwah, PKS menempatkan perhatian besar pada pembinaan kader yang militan dan loyal, serta memperjuangkan kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan ideologi ini mempengaruhi struktur organisasi dan pendekatan kedua partai dalam melakukan rekrutmen politik serta kampanye. PKS, misalnya, menerapkan mekanisme kaderisasi yang

ketat dan terstruktur, dengan menekankan pada integritas dan akseptabilitas calon. Sementara itu, Partai Demokrat cenderung lebih fleksibel dalam proses rekrutmen, dengan membuka peluang bagi masyarakat umum untuk menjadi kandidat, selama mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh partai.

Dari segi strategi politik, PKS lebih sering menggunakan pendekatan yang berbasis pada militansi kader dan pelayanan sosial, sementara Partai Demokrat cenderung memanfaatkan jaringan sosial dan dukungan dari elite politik. Kedua partai ini juga memiliki pola kampanye yang berbeda, di mana PKS lebih banyak menggunakan pendekatan door-to-door dan pengajian, sedangkan Partai Demokrat lebih mengandalkan kampanye media dan relasi publik.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bagaimana ideologi dan strategi partai mempengaruhi dinamika politik di Indonesia, serta memberikan wawasan tentang bagaimana partai-partai ini merespons tantangan dan peluang dalam Pemilu 2024. Temuan dalam penelitian lain, terdapat perbedaan mendasar antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dalam hal pola pengkaderan (kaderisasi) dan pencalonan (kandidasi) yang menjadikan ciri khas kedua partai ini. Menurut Mentari (2018) berikut adalah analisis komprehensif mengenai dua aspek tersebut:

1. PKS (Partai Keadilan Sejahtera)

- a) Struktur Berjenjang dan Militansi: PKS memiliki sistem kaderisasi yang sangat terstruktur dan berjenjang, yang diatur secara ketat dan bertujuan membentuk loyalitas ideologis. Kaderisasi PKS tidak hanya melibatkan proses pendidikan politik, tetapi juga proses dakwah yang memperkuat pemahaman agama. Setiap kader mengikuti tahapan kaderisasi formal yang ketat dan sistematis, mulai dari tingkat akar rumput hingga tingkat elit partai.

- b) Penekanan pada Pendidikan Ideologis: Kaderisasi PKS berfokus pada penanaman ideologi Islam, membangun loyalitas kader terhadap partai, dan kemampuan untuk memahami serta memperjuangkan visi-misi partai di berbagai lapisan masyarakat. Militansi kader ini memastikan bahwa setiap kader yang naik ke jenjang lebih tinggi benar-benar memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai partai.
- c) Regenerasi Kepemimpinan yang Rutin: PKS memiliki tradisi regenerasi yang rutin di dalam tubuh partai. Pergantian pemimpin sering kali dilakukan melalui mekanisme yang transparan, dan partai menekankan pengembangan kader yang siap memimpin. Regenerasi ini menjadi bukti bahwa partai tidak terlalu bergantung pada figur tertentu, tetapi lebih pada kolektivitas organisasi.

Dengan demikian, pengkaderan di PKS menekankan kesinambungan ideologi dan soliditas organisasi. Kaderisasi berjenjang memastikan bahwa setiap anggota memiliki pemahaman mendalam tentang partai dan agama, memperkuat posisi partai sebagai entitas politik yang disiplin. Meski demikian, pendekatan ini membuat partai lebih sulit menarik dukungan di luar basis ideologisnya, mengingat kaderisasi yang sangat spesifik pada segmen Islamis. Sistem ini, meski sangat kokoh, menciptakan tantangan dalam menarik pemilih yang lebih luas, terutama di era politik pragmatis dan kompetitif di Indonesia.

- d) Seleksi Kandidat Berdasarkan Loyalitas dan Kompetensi:

Proses seleksi calon dalam PKS sangat berfokus pada loyalitas kader terhadap partai dan kemampuannya dalam melaksanakan visi partai. Hanya kader yang telah melewati tahapan kaderisasi yang ketat yang dapat dicalonkan untuk jabatan publik. Kader

yang dicalonkan harus menunjukkan komitmen terhadap ideologi partai serta memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik dalam memperjuangkan kepentingan partai

- e) **Konsistensi dengan Nilai-Nilai Ideologis:** Kandidasi dalam PKS juga mencerminkan fokus pada kader yang konsisten dengan nilai-nilai partai. Tidak ada ruang bagi kandidat yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar PKS. Partai juga tidak sembarangan mencalonkan kader hanya berdasarkan popularitas atau kemampuan mendulang suara, tetapi menekankan pentingnya kualitas kader sebagai representasi dari nilai-nilai yang diusung PKS

Dengan demikian, PKS memilih pendekatan yang sangat ketat dalam seleksi kandidat, dengan memastikan setiap calon memiliki loyalitas dan kompetensi yang tinggi sesuai dengan prinsip ideologi Islam partai. Pendekatan ini menjaga konsistensi dan integritas partai, namun bisa menjadi penghalang dalam mencapai daya tarik yang lebih luas di antara pemilih pragmatis yang mungkin mencari kandidat dengan popularitas dan kepraktisan.

2. Partai Demokrat

- a) **Pola Kaderisasi yang Kurang Terstruktur:** Berbeda dengan PKS, Partai Demokrat sejak awal lebih mengutamakan pencitraan dan popularitas ketimbang kaderisasi yang solid. Proses kaderisasi di Partai Demokrat tidak seformal dan seberjenjang seperti di PKS. Demokrat lebih menekankan pada pelatihan praktis dan pengembangan kemampuan politis yang lebih pragmatis.

- b) Ketergantungan pada Tokoh Sentral: Pengkaderan di Demokrat cenderung terpusat pada figur SBY sebagai simbol sentral partai. Hal ini menyebabkan kaderisasi di dalam partai tidak berjalan dengan baik, karena banyak kader yang lebih terfokus pada loyalitas kepada SBY ketimbang pada nilai-nilai atau ideologi partai itu sendiri. Akibatnya, regenerasi di partai ini tidak sekuat PKS, dan partai sering mengalami masalah dalam membangun basis kader yang loyal dan terorganisasi.

Dengan demikian, kaderisasi yang tidak terstruktur dengan baik di Partai Demokrat menunjukkan kelemahan internal partai dalam menciptakan kader yang solid. Ketergantungan partai pada tokoh sentral seperti SBY menjadikan Demokrat sebagai partai personalistik, yang lebih rentan terhadap perubahan politik ketika tokoh tersebut tidak lagi menjadi pusat perhatian. Kelemahan kaderisasi ini juga terlihat ketika partai harus menghadapi masalah internal, seperti skandal korupsi yang melibatkan beberapa kader penting.

- c) Seleksi Kandidat Berdasarkan Popularitas: Partai Demokrat, sejak awal, cenderung memilih kandidat berdasarkan popularitas daripada kemampuan ideologis atau kompetensi yang dalam. Hal ini terlihat dari bagaimana partai mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai simbol partai dan menggunakan popularitasnya untuk menarik suara. Seleksi kandidat dalam Demokrat sering kali didasarkan pada kemampuan tokoh tersebut mendongkrak elektabilitas partai, bukan karena kapasitas mereka sebagai kader yang memahami atau memperjuangkan ideologi partai.
- d) Pendekatan Pragmatis: Partai Demokrat lebih pragmatis dalam proses pencalonannya, dengan fokus utama pada figur-figur yang dapat memenangkan suara dalam pemilu. Hal ini berisiko

karena partai lebih mengandalkan personal branding daripada ideologi atau nilai yang lebih mendasar. Meskipun hal ini memberi keuntungan jangka pendek, terutama dalam hal kemenangan elektoral, pendekatan ini menyebabkan kerentanan internal ketika figur sentral seperti SBY tidak lagi bisa menjadi pusat kekuatan partai.

Kandidasi di Partai Demokrat menekankan popularitas dan kemampuan meraih suara ketimbang kualitas kader secara ideologis atau kompetensi dalam mengelola jabatan publik. Meskipun strategi ini berhasil dalam dua pemilu pertama Demokrat, pendekatan ini terbukti kurang efektif dalam jangka panjang, terutama setelah partai menghadapi skandal yang melibatkan para kader utamanya. Ketergantungan pada figur sentral seperti SBY menciptakan organisasi yang rapuh, dan kurangnya kaderisasi yang kuat menjadikan partai tidak memiliki pemimpin alternatif yang cukup kompeten.

Dengan demikian, pada ciri khas keduanya dilihat dari kaderisasi dan kandidasinya memiliki perbedaan. PKS menekankan struktur kaderisasi berjenjang, dengan fokus pada pendidikan ideologis dan loyalitas kader. Dalam pencalonan, PKS memilih kandidat berdasarkan kompetensi ideologis dan konsistensi dengan nilai-nilai partai. Meskipun hal ini memberikan soliditas internal, pendekatan ini juga membatasi daya tarik partai di luar basis pemilih tradisionalnya.

Sementara Partai Demokrat lebih mengutamakan pragmatisme dan popularitas, baik dalam kaderisasi maupun pencalonan. Partai ini kurang memperhatikan kaderisasi formal dan lebih bergantung pada figur sentral seperti SBY. Dalam pencalonan, Demokrat memilih kandidat yang dapat mendongkrak elektabilitas, namun pendekatan ini terbukti rentan dan menyebabkan rapuhnya struktur organisasi

partai. Kedua pendekatan ini mencerminkan prioritas dan tantangan masing-masing partai dalam upaya mereka untuk memenangkan dukungan publik di tengah realitas politik Indonesia yang dinamis.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Penelitian ini didasarkan pada perbedaan signifikan dalam strategi pola kandidasi antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan kandidasi antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2024 meliputi:

1. Siapa yang Dicalonkan, Partai Demokrat cenderung memilih tokoh-tokoh populer dan eksternal, seperti mantan kepala daerah dan tokoh masyarakat yang memiliki elektabilitas tinggi. Sementara, PKS mengutamakan inklusivitas dengan membuka ruang bagi calon legislatif dari kalangan kader lama dan kader baru yang belum melalui proses kaderisasi penuh. Pemilihan calon lebih berfokus pada kemampuan mereka dalam menggalang dukungan massa dibanding kompetensi profesional.
2. Siapa yang Memutuskan, , Partai Demokrat, proses seleksi caleg diputuskan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di tingkat pusat, dengan penetapan akhir oleh Ketua Umum partai. Sementara, Proses seleksi di PKS dikelola oleh Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) di tingkat wilayah (DPW). BP3 memiliki wewenang besar dalam menentukan calon, yang mencerminkan model keputusan yang desentralistik namun terpusat pada struktur internal wilayah partai.
3. Dimana kandidat di seleksi, pencalonan caleg partai Demokrat dilakukan oleh Badan Ad Hoc atau yang disebut dengan Panitia seleksi calon. Panitia tersebut dibentuk melalui DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung terdiri dari pengurus DPC dan

masyarakat umum. Disisi lain, penentuan caleg PKS merupakan hasil koordinasi antara berbagai tingkatan kepengurusan partai dengan peran utama dipegang oleh DPW dan DPP serta penetapan nomor urut oleh Tim BP3.

4. Bagaimana kandidat di putuskan, Demokrat dalam memutuskan penetapan caleg dengan rakercab dan penentuan nomor urut caleg merupakan hak prerogatif Ketua DPD dan DPC. Sedangkan, PKS mengimplementasikan model penunjukan caleg yang khas, menghindari proses pemilihan terbuka dan langsung mengangkat calon legislatif melalui rekomendasi pimpinan partai

Partai Demokrat, meskipun memiliki strategi rekrutmen yang mengandalkan tokoh-tokoh populer, hanya mampu meraih 7,34% suara dan mendapatkan 1 kursi, menunjukkan bahwa strategi ini tidak cukup efektif dalam dapil yang kompetitif. Dengan hasil tersebut, PKS dan Demokrat perlu mengevaluasi kembali pendekatan rekrutmen dan kandidasi calonnya untuk meningkatkan hasil di pemilu berikutnya. Keduanya menunjukkan perbedaan signifikan dalam pola rekrutmen dan seleksi calon legislatif, mencerminkan cara masing-masing partai memanfaatkan kekuatannya untuk bersaing di pemilu.

Pada hasil Pemilu Legislatif 2024 di Dapil 6 Lampung menunjukkan bahwa PKS, memperoleh 7,84% suara, gagal mendapatkan kursi karena pola rekrutmen yang terlalu inklusif dan kurangnya penekanan pada kompetensi profesional caleg. Kandidasi caleg oleh partai politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara caleg. Dalam hal ini caleg PKS di Dapil 6 kurang memiliki personal branding, selain itu rekam jejak dalam politik serta kedekatan personal dengan pemilih sangat penting untuk memperoleh suara terbanyak.

6.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, beberapa langkah strategis perlu dilaksanakan oleh Partai Demokrat Lampung dan PKS Lampung:

- 1) Hendaknya Partai Demokrat Lampung agar memperkuat kaderisasi dengan menguatkan ideologi partai yang lebih mendalam kepada kader baru agar memperkuat posisinya didalam partai dan sebagai caleg, sembari mengembangkan pendekatan inklusifnya dengan terus melibatkan tokoh-tokoh lokal yang memiliki potensi besar. Kedua, partai juga perlu mempertimbangkan proses kandidasi saat ini terhadap kualitas caleg yang dicalonkan partai dalam kontestasi pemilu dalam masa mendatang.
- 2) Seyogyanya PKS Lampung memperkuat kaderisasi dan menambahkan evaluasi kompetensi yang lebih mendalam, terutama bagi kader baru. PKS Lampung juga perlu menguatkan kandidasi berdasarkan kaderisasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para caleg tidak hanya memiliki dukungan massa, tetapi juga memiliki kapasitas dan integritas serta rekam jejak dalam dunia politik untuk menjalankan tugas legislatif secara efektif. Kandidasi sangat penting karena bisa mempengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu, partai diharapkan dapat lebih memperhatikan kandidasi para caleg untuk mengikuti pemilihan legislatif.
- 3) Sebaiknya masyarakat/pemilih melakukan partisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan mencari informasi lebih mendalam dan mempertimbangkan kualitas caleg daripada sekedar popularitas. Hal ini dapat membawa perubahan positif baik di pemerintahan maupun partai politik. Partisipasi pemilih dalam mengenal kandidat dan menilai kemampuan mereka sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Yusra, Lili Romli, F. N. (2022). Seleksi Kandidat Dalam Kontestasi Elektoral: Studi Kasus Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Oleh Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Tahun 2005 Dan Tahun 2020. *Jurnal Penelitian Politik, Volume 19*.
- Atfal, I. R. (2022). *Strategi Penjaringan Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020*. Universitas Lampung.
- Barakso, Maryan, Daniel, M. S., & Scahffner, B. (2014). *Understanding Political Science Research Methods : The Challenge of Inference*. Routledge.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama.
- Bungin, B. (2015). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Dalton, Russel J., dan M. P. W. (2000). *Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial democracies*. Oxford University Press.
- Darmastuti, A. (2020). *Partai Politik, Pemilihan Umum dan Peran Perempuan dalam Politik dan Pembangunan*. Penerbit Quantum.
- Diamond, L. (1996). *Developing Democracy Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Farisha, F., & Gatra. (2019). Data KPU, Caleg Eks Koruptor Bertambah Jadi 81 Orang. [://Nasional.Kompas.Com](https://nasional.kompas.com).
<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/12241321/data-kpu-caleg-eks-koruptor-bertambah-jadi-81-orang>
- Firmanzah. (2018). *Mengelola Partai Politik ; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Fuad, Anis & Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Hazan, R.Y. & Rahat, G. (2010). *Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*. Oxford University Press.
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
<https://www.demokrat.or.id/>. (n.d.). *Demokrat*.
- Katz, R.S. & Crotty, W. (2014). *Hand Book Partai Politik*. Nusamedia.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2014). *Hand Book Partai Politik*. Nusamedia.

- Laily Purnawati. (2017). Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif pada Partai Politik. *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*.
- Macridis, R. C. (1988). *Pengantar Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai” dalam ichlasul Amal (ed), Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Tiara Wacana.
- Mandala. (2016). *Rekrutmen Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Oleh Partai Politik Pada Pilkada Di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015 (Studi Perbandingan Pada DPC Partai Gerindra Dan DPC PKB Kabupaten Pesawaran)*. Universitas Lampung.
- Mentari, D. S. (2018). *Harga sebuah pilihan: strategi PKS dan Partai Demokrat menata raut wajah*. Polgov.
- Miles., Mathew, B. A., & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong & Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, & Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, & Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2016). *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Norris, P. (2006). Handbook of Party Politic 'Rekrutmen dalam Richard S Katz and William Crotty (ed) (2006). In *Sage Publication*.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism.
- Pratama, A. A. (2021). *Rekrutment Politik Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Kabupaten Tanggamus)*. Universitas Lampung.
- Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2001). Candidate Selection Methodes An Analytical Framework. *Party Politics*, 7(3), 297–322.
- Rahmat, M. I. (2008). *Ideologi Politik PKS*. PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Rush, M. & Althoff, P. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik. Ghalia Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Satori, D. & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Rajawali Pers.
- Sudrajat. (2018). Elite Demokrat di Pusaran Korupsi. <https://News.Detik.Com/>.

- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*. CV Solusi Distribusi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Refika Aditama.
- Sujatmiko, A. P. (2016). *Kartelisasi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*. Universitas Lampung.
- Sukmajati, M., Dwipayana, A.A., Pamungkas, S. & Gustomy, R. (2012). *Rekrutmen Kepala Daerah dalam Teori dan Praktik: Pengalaman dari Kota Yogyakarta*. Research Center for Politics and Government FISIPOL UGM.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo Utama.
- Tampinongkol, D., Kasenda, V., & Kimbal, A. (2018). Kandidasi Partai Politik Dalam Pencalonan Anggota Dprd Di Kota Bitung Pada Pileg 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung). *Jurnal Eksekutif, Vol 1 Nomo*.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Urbaningrum, A. (2010). *Revolusi Sunyi “Mengapa Partai Demokrat dan SBY Menang dalam Pemilu 2009?”* Mizan.
- Y. Crowell Company.Komala, D. A. (2020). *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2019 di Yogyakarta Studi Kasus: Partai Solidaritas Indonesia*. Universitas Gajah Mada.